

**PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI BPKAD KABUPATEN KAMPAR RIAU DENGAN
IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**



Oleh:

Nama: Indah Ariaty Putri

Nomor Induk Mahasiswa: 18312263

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI BPKAD KABUPATEN KAMPAR RIAU DENGAN
IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memnuhi sebagai salah satu syarat mencapai derajat
Sarjana Strata-1 pada Program Studi Akuntandi Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam referensi ini. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta,

Peneliti,



(Indah Ariaty Putri)

**PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI BPKAD KABUPATEN
KAMPAR RIAU DENGAN IMPLEMENTASI
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

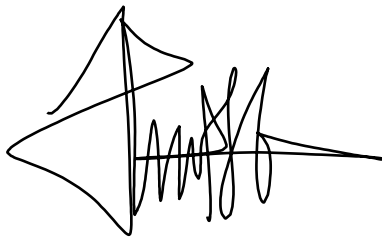
Nama: Indah Ariaty Putri

Nomor Induk Mahasiswa: 18312263

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', written over a horizontal line.

Hendi Yogi Prabowo, S.E., M. For.Accy., Ph.D., CFrA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Kampar Riau dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Disusun oleh : INDAH ARIATY PUTRI

Nomor Mahasiswa : 18312263

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 10 Oktober 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra.,
Ph.D.

Penguji : Sigit Pamungkas, SE., M.Com.

.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arfan, S.E., M.Sc., Ph.D., CFra, CertIPSAS.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas hidayahnya. Berkat rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umat manusia dari alam yang gelap ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Skripsi yang berjudul **“Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Kampar Riau dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual”** ditulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Sarjana (s-1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan Terimakasih dan syukur kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Johan Arifin, S.E., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada peneliti, memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dalam memberikan pengetahuan, arahan serta kesempatan dan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
5. Kepada Ibu Rohati Yahya terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada peneliti, terimakasih atas *support*, bimbingan, dan doa yang tidak henti dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan peneliti. Tidak ada kata yang mampu diungkapkan untuk rasa ucapan terimakasih atas pengorbanan yang diberikan selama ini.
6. Abang peneliti, Andrey Dharmawan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak pada BPKAD Kabuapten Kampar, terkhusus Bapak Mukhrizal, Bapak Andi Suandi, Bapak Mas'ud, serta Ibu Yurnida yang telah memberikan bantuan dan membantu peneliti dalam memperlancar proses penelitian.

8. Kepada Kak Ghina dan Mba Jasmine, yang selalu membantu dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman seperbimbingan Rizki Tania Putri, semoga hasil yang kita dapatkan menjadi kebanggaan untuk kita, terimakasih selalu mendengar keluh kesah peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Egi Dwi Afira, Diki Wahyudi, Yonisha Sumual, yang telah memberikan *support*, waktu, dan menemani peneliti dikala suka dan duka.
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Dora Fahzira, Mesa Salsabila, Nurhaliza. Terimakasih telah memberikan semua dukungannya sejak masuk kuliah hingga sekarang. Semoga pertemanan kita selalu terjalin hingga hari tua.
12. Fitri Alfaini Yasir, terimakasih telah menemani peneliti selama penyusunan skripsi, terimakasih telah memberikan *support* dan dukungannya.
13. Untuk rekan-rekan IPRYKK, terimakasih telah memberikan peneliti pelajaran yang sangat berharga dimasa perkuliahan ini, terimakasih sudah menjadi saksi perjuangan peneliti dari awal kuliah hingga saat ini.

14. Rekan-rekan FBE UII Angkatan 2018, terimakasih telah menjadi teman untuk peneliti. Semoga seukses dan bisa bertemu di kemudian hari.
15. BPKAD Kabupaten Kampar sebagai objek penelitian dalam skripsi ini. Terimakasih telah membantu dan bekerja sama dengan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
16. Untuk semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu peneliti dalam proses penyusunan ini. Semoga selalu dilindungi Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan segala limpahan rahmat dan karunia atas kebaikan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terwujudnya skripsi ini. Aamiin.

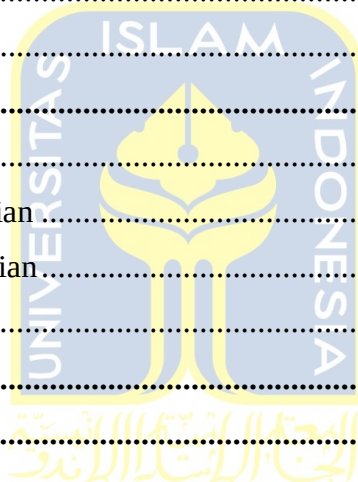
Yogyakarta, 12 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
BERITA ACARA TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengenalan Bab.....	1
1.2 Latar Belakang Masalah.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Fokus Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengenalan Bab.....	11
2.2 Landasan Teori	11
2.3 Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pengenalan Bab.....	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Instrumen Penelitian	31
3.4 Fokus Penelitian.....	32
3.5 Sistematika Penelitian	33
3.6 Sumber dan Pengumpulan Data.....	40
3.7 Objek Penelitian.....	43
3.8 Teknik Pengumpulan Data	43

3.9 Teknik Pengujian Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Pengenalan Bab.....	47
4.2 Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Kampar	47
4.3 Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Kampar Riau Sebelum dan Sesudah Implementasi Berbasis Akrual.....	56
4.4 Kekurangan dan Kendala Dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di Kabupaten Kampar Riau	78
4.5 Usulan Perbaikan Terhadap Kendala Dalam Menjalankan SAP Berbasis Akrual	86
4.6 Kesimpulan Bab.....	90
BAB V PENUTUP	92
5.1 Pengenalan Bab.....	92
5.2 Kesimpulan Penelitian	92
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	93
5.4 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	99



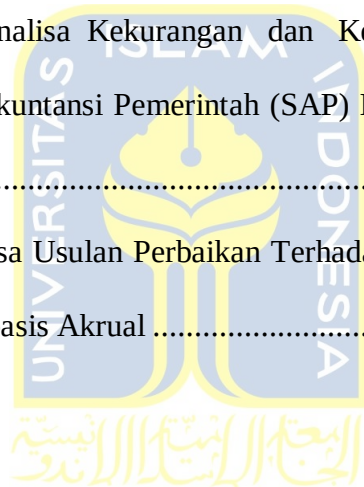
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Partisipan Wawancara.....	42
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sistematika Penelitian	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kampar	49
Gambar 4.2 Peta Analisa Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual	59
Gambar 4.3 Peta Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Sesudah Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual.....	67
Gambar 4.4 Peta Analisa Kekurangan dan Kendala Dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di Kabupaten Kampar	78
Gambar 4.5 Peta Analisa Usulan Perbaikan Terhadap Kendala Dalam Menjalankan SAP Berbasis Akrual	86



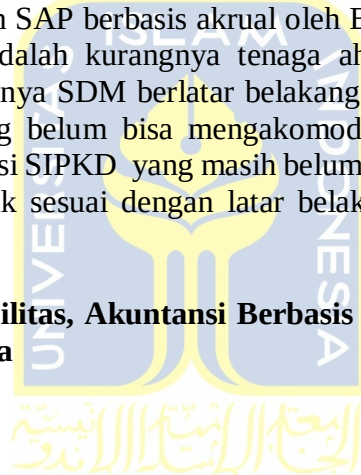
DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Transkrip Wawancara 1	99
LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara 2	105
LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara 3	110
LAMPIRAN 4 Transkrip Wawancara 4	112
LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara 5	113
LAMPIRAN 6 Transkrip Wawancara 6	116
LAMPIRAN 7 Transkrip Wawancara 7	118
LAMPIRAN 8 Transkrip Wawancara 8	121
LAMPIRAN 9 Surat Izin Penelitian	123
LAMPIRAN 10 Peraturan Bupati Kampar No. 62 Tahun 2016	124
LAMPIRAN 11 Peraturan Bupati Kampar No. 20 Tahun 2014	125
LAMPIRAN 12 Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum Berbasis Akrua.....	126
LAMPIRAN 13 Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengeelolaan Keuangan Daerah Sesudah Berbasis Akrua	129
LAMPIRAN 14 Framework Matrices Kekurangan dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua	132
LAMPIRAN 15 Framework Matrices Usulan Perbaikan Terhadap Kendala dalam Menjalankan SAP Berbasis Akrua	135

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Kampar Riau, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang di ambil yaitu Studi Kasus. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi dan mempelajari dokumen yang terkait dengan Akuntabilitas penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas dari penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Kampar dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kampar oleh BPK Provinsi Riau yang Wajar Tanpa Pengecualian dalam 7 tahun berturut turut pada tahun 2015-2021. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya SDM terkait Akuntansi dan minimnya sistem pendukung. Kekurangan dan kendala yang muncul dalam proses penerapan SAP berbasis akrual oleh BPKAD Kabupaten Kampar diantaranya adalah kurangnya tenaga ahli akuntansi yang disebabkan oleh minimnya SDM berlatar belakang jurusan akuntansi, sistem pendukung yang belum bisa mengakomodir kebutuhan yang disebabkan oleh Aplikasi SIPKD yang masih belum berfungsi dan juga mutasi SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki.

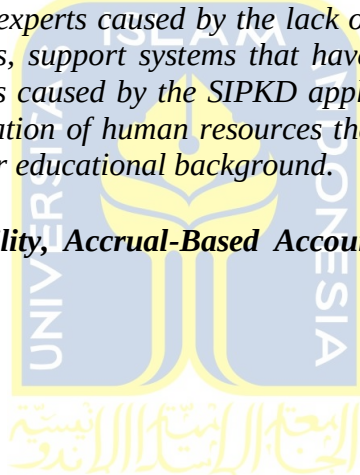
Kata Kunci: Akuntabilitas, Akuntansi Berbasis Akrual, Regulasi, Sumber Daya Manusia



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of accrual-based accounting in regional financial management in BPKAD Kampar Riau Regency. The method used in this study is a qualitative method with the type of qualitative research taken, namely Case Studies. The case study data was obtained by interview, observation and document research related to the accountability of accrual-based accounting application at BPKAD Kampar Regency. The results showed that the effectiveness of the accrual-based SAP application in Kampar Regency was evidenced by the results of the Kampar Regency LKPD Examination by the Riau Province BPK which were unqualified in 7 consecutive years in 2015-2021. However, there are several obstacles that cause the lack of HR related to accounting and the lack of a support system. Weaknesses and obstacles that arise in the process of applying accrual-based SAP by BPKAD Kampar Regency include the lack of accounting experts caused by the lack of human resources with accounting majors, support systems that have not been able to accommodate the needs caused by the SIPKD application that is still working and the mutation of human resources that are not working and does not match their educational background.

Keywords: *Accountability, Accrual-Based Accounting, Regulation, Human Resource*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini adalah awalan dalam penyusunan skripsi, untuk membahas terkait kapan, bagaimana, siapa dan apa yang hendak diteliti. Serta manfaat dan tujuan dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, fokus, manfaat dan sistematika penulisan.

1.2 Latar Belakang Masalah

Penerapan akuntansi berbasis akrual di negara berkembang meningkat, salah satunya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 2003 (Zelmiyanti, 2015). UU no 17 tahun 2003 adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia ingin melakukan perubahan dalam metode akuntansi untuk sector public.

Basis akuntansi sangat penting dalam akuntansi karena menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih akan menentukan jenis pelaporan, terutama bentuk laporan, karena akan mempengaruhi informasi dan unsur yang dilaporkan (Najati, 2016).

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian tersebut harus diakui untuk pelaporan keuangan. Secara mendasar basis akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu basis kas dan basis akrual (Yafie, 2013).

Pemerintah daerah diuntut untuk mengelola keuangan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dimana pelaporan keuangan merupakan sebagai media komunikasi penting bagi sector public khususnya pemerintah. Pelaporan keuangan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber- sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah (Marthen, 2017).

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP No. 71 Tahun 2010 yang pada dasarnya pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diakui adalah pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan, serta pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai Sistem akuntansi keuangan berbasis akrual, Sistem yang digunakan oleh pemerintah adalah sistem single entry accounting atau biasa disebut dengan sistem akuntansi tata buku tunggal yang berbasis kas. Sistem pencatatan ini sederhana yaitu mencatat setiap satu kali terjadinya transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah maka akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang maka akan dicatat pada sisi pengeluaran. Namun karena sangat sederhana nya sistem pencatatan single entry ini maka sistem ini banyak memiliki kelemahan.

Kelemahan dari sistem akuntansi berbasis kas itu diantaranya adalah informasi yang kompleks sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas, relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan kurang karena basis kas ini hanya berfokus pada aliran kas nya saja, serta pertanggungjawaban ke publik sangat terbatas karena tidak mencatumkan pengelolaan aktiva dan utang melainkan hanya mencantumkan penggunaan kas saja (Risnansih, 2016).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi awal perbaikan keuangan negara di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan agar pemerintah melakukan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2008. Berdasarkan kenyataannya sistem

akuntansi berbasis akrual ini belum bisa diterapkan. Kegagalan pada penerapan akuntansi berbasis akrual dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdapat dua lampiran, Lampiran I membahas tentang akuntansi berbasis akrual, sedangkan Lampiran II membahas tentang cash toward accrual dimana dalam lampiran ini tersirat bahwa pemerintah masih memberikan kesempatan bertahap untuk menuju ke sistem akuntansi berbasis akrual sepenuhnya.

Penerapan basis akrual pada akuntansi bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan dan ketidak cukupan informasi yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Basis Akrual adalah Suatu basis akuntansi dimana transaksi atau peristiwa ekonomi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar (Ferryono, 2017). Beban dan pendapatan secara hati-hati disamakan. Basis Akrual menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan.

Praktek akuntansi dalam pemerintah tidak selalu berjalan dengan mudah, karena salah satu adanya perbedaan karakteristik lingkungan

sector publik, yaitu rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah pada saat sekarang masih banyak disebabkan oleh aparat pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan keuangan negara. Di dalam pemerintah daerah yang telah menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor public masih terdapat kelemahan dan permasalahan yang sering terjadi, diantaranya permasalahan tentang kesiapan sumber daya manusia (SDM), yaitu menuntut perubahan mulai dari tingkat penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan sebab mulai muncul kewajiban untuk membuat laporan operasional yang mencatat pendapatan dan beban secara akrual.

Maka dari itu, saya mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Kampar Riau dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual” dengan studi kasus yang dilakukan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintahan Indonesia terkhusus pada BPKAD Kabupaten Kampar yang menjadi objek pada penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Kampar sebelum dan sesudah implementasi akuntansi berbasis akrual?*

Rumusan Masalah ini bertujuan untuk membahas mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Kampar sebelum dan sesudah pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual di dalam penyusunan pelaporan keuangan. Dengan rumusan masalah ini peneliti dapat mengetahui gambaran tentang mekanisme pelaporan keuangan di Kabupaten Kampar serta kendala yang muncul dalam prosesnya.

2. *Apakah kendala yang di hadapi BPKAD Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual?*

Rumusan Masalah ini berfungsi untuk mengetahui besarnya kendala yang terjadi dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, terkhusus dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada BPKAD Kabupaten Kampar dan hasil dari rumusan masalah ini akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pemberian saran perbaikan.

3. *Perbaikan apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kendala BPKAD Kabupaten Kampar dalam menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual dimasa yang akan datang?*

Rumusan Masalah ini bertujuan untuk merekomendasikan beberapa usulan perbaikan terhadap kendala yang terjadi dari pengimplementasian akuntansi berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Kampar agar dapat menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih baik dimasa yang akan datang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akuntabilitas dan transparan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh BPKAD kabupaten Kampar sebelum dan sesudah implementasi akuntansi berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual.
3. Untuk mengetahui Perbaikan apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kendala BPKAD Kabupaten Kampar dalam menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual dimasa yang akan datang.

1.5 Fokus Penelitian

Agar hasil yang diperoleh dapat untuk menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar, Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang No.204, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28554

2. Aspek Penelitian: Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Kampar Riau dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua
3. Waktu Penelitian: 1 Mei – 31 Juli 2022
4. Objek Penelitian: Pihak-pihak yang bertanggung jawab pada Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kampar

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian tentang penerapan akuntansi berbasis akrual ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya terutama bidang akuntansi sektor publik atau pada pemerintahan.
2. Bagi instansi Pemerintahan atau SKPD terkait agar digunakan untuk menambah informasi dan dapat dijadikan masukan serta evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual secara penuh yang telah dimulai sejak tahun 2015.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu, berisi latar belakang masalah, Dari latar belakang tersebut lalu dibuatlah rumusan masalah. Selanjutnya membahas fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini berisikan teori teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Teori yang menjawab permasalahan penelitian yang ada. Bab dua juga terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kerangka pemikiran dari penelitian ini serta untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga ini berisikan tentang perencanaan kegiatan yang digunakan pada penelitian ini. Hal-hal yang dijelaskan pada bab tiga adalah jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengujian keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menjabarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut disusun berdasarkan rumusan yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Pada bab dua ini berisi teori-teori yang diterapkan menjadi acuan dan landasan dalam penelitian untuk dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Isi dari Tinjauan pustaka ini adalah teori, definisi, dan tinjauan penelitian terdahulu mengenai akuntansi berbasisakrual pada pemerintahan daerah. Bab kajian pustaka ini difungsikan sebagai landasan teori dalam analisa hasil di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ada.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory adalah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah dalam hubungan antara pelaku bisnis dan agennya. Yang paling umum, hubungan itu adalah hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan eksekutif perusahaan, juga sebagaiagen.

Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan teori yang mengemukakan bahwa pemisahan antara pemilik dan manajer suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan yang dimaksud antara lain adalah terjadinya informasi asimetris (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola. Dengan kepemilikan informasi yang tidak merata, manajemen (agent) perusahaan cenderung melakukan moral hazard dan *adverse selection*. Manajer memang memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Namun di sisi lain manajer juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Penyatuan kepentingan pihak-pihak tersebut seringkali menimbulkan masalah yang disebut masalah agensi.

Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu pada pemenuhan tujuan utama pengelolaan keuangan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemaksimalan kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menciptakan apa yang disebut masalah keagenan. Beberapa penelitian yang memperluas konsep hubungan principal-agent ke tipe kedua adalah hubungan antara atasan- bawahan, Manager-karyawan, manajer-pekerja. (Ekanayake, 2004).

Teori keagenan merupakan salah satu konsep pelaporan keuangan atas organisasi sektor publik antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat dalam hal ini yaitu stakeholder harus mampu menilai akuntabilitas dan kebijakan yang berasal dari beberapa pertimbangan baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini menjadi suatu kesadaran bahwa banyak pihak yang akan mengendalikan informasi laporan keuangan pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Hal ini yang mendorong informasi keuangan harus berkualitas. Laporan harus disajikan dengan wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya. Penerapan akuntansi akrual pada pemerintah dapat menjadi salah satu tolak ukur dari pertanggungjawaban pemerintah sebagai agen kepada masyarakat sebagai principal.

2.2.2 Akuntabilitas

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas

Menurut Mardismo (2009), akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclousure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat dipenuhi.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan sangatlah penting bagi masyarakat yang berperan sebagai pelaku ekonomi. Pengelolaan keuangan adalah suatu aksi untuk memenuhi kebutuhan keuangan pada masa yang akan datang, dan digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi pribadi, keluarga, ataupun perusahaan. Pengelolaan keuangan juga mempunyai tujuan agar mencapai kesuksesan dalam keuangan (Al Falih, 2019).

Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengeawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.2.4 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah merupakan bagian disiplin ilmu akuntansi yang perkembangannya di Indonesia cukup pesat pada akhir-akhir ini. Perkembangan akuntansi pemerintah ini dipengaruhi oleh tuntutan publik akan kinerja pemerintah karena dana yang telah dikeluarkan. Akuntansi pemerintah ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, regulasi berperan penting dalam akuntansi pemerintah salah satunya yaitu sebagai batasan dalam kinerja organisasi publik. Akuntansi pemerintah dalam ilmu akuntansi sangat berhubungan erat. Terdapat dua sector dalam akuntansi yaitu sektor profit dan nonprofit. Untuk sektor nonprofit, yaitu akuntansi pemerintah, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan dan akuntansi organisasi nirlaba lainnya, yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Sedangkan untuk sector profit salah satunya adalah akuntansi bisnis. (Adhitama, 2017)

2.2.5 Perkembangan Akuntansi Pemerintah di Indonesia

Istilah akuntansi pemerintah mulai dipakai pada tahun 1952. Pada saat itu, akuntansi pemerintahan sering diasosiasikan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro terkait pembangunan dan instansi pelaksana

pembangunan (Mardiasmo, 2018) . Akuntansi Pemerintah mendapatkan banyak kritik dan serangan pada tahun 1970-an dari pendukung teori pembangunan radikal. Dalam menggerakkan dan mempertahankan pembangunan, mereka mempertanyakan peran dari akuntansi pemerintah tersebut. Dibandingkan dengan akuntansi bisnis, akuntansi pemerintah dianggap tidak efisien dan tertinggal. Pembangunan lebih arahkan dan bekerjasama kepada sector komersial membuat kedudukan akuntansi pemerintah menjadi semakin lemah (Mardiasmo, 2018). Pengeluaran finansial dianggap lebih banyak dibandingkan penerimaannya pada akuntansi pemerintah. Pada saat ini, hal ini menyebabkan terjadinya kontradiksi didalam perekonomian dan pembangunan negara.

Akuntansi pemerintah mengalami reformasi terkhusus di negara-negara yang industri nya sudah maju pada tahun 1980-an. Perubahan tersebut menyelesaikan dan menjawab semua kritikan yang pernah dilontarkan oleh pendukung teori pembangunan radikal. Perubahan yang dilakukan antara lain dengan mengadopsi pendekatan *New Public Management (NPM)* dan *reinventing government* di berbagai negara (Mardiasmo, 2018). Fungsi-fungsi pemerintah memperoleh hasil yang maksimal dari NPM yang dianggap paradigm baru manajemen pemerintah yang menekankan kontrol atas output kebijakan pemerintah. Dengan begitu, akuntansi pemerintah dapat menerima NPM. Dengan adanya perubahan dalam akuntansi pemerintah tersebut, terjadilah perubahan yang lainnya. Contohnya adalah perubahan dari sistem akuntansi yang mana berawal dari sistem akuntansi berbasis kas berubah menjadi sistem akuntansi berbasis akrual (Mardiasmo, 2018). Pada tahun 1991 negara seperti New Zealand, Jepang, Italia, dan negara-negara eropa lainnya melakukan perubahan

sistem akuntansi pemerintahan. Untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam akuntansi pemerintah menjadi tujuan dari negara-negara tersebut untuk melakukan perubahan (Mardiasmo, 2018). Perubahan terhadap sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia terjadi pada tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Peraturan tersebut pemerintah pusat dan daerah tidak lagi menerapkan cash toward accrual tetapi harus menerapkan akuntansi akrual penuh selambat-lambatnya pada tahun 2015.

2.2.6 Pemerintah Daerah

Menurut UU nomor 22 Tahun 1999 dalam Abdul Halim, Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya, pemerintah daerah yang dimaksud adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatifnya adalah DPRD.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat pemisahan antara Lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut UU no 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut juga dengan UU otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.7 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sesuai dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan SAP. SAP ditetapkan di lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah, jika menurut Peraturan Perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. (Adhitama, 2017).

2.2.8 Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah siklus akuntansi, oleh karena itu basis akuntansi menjadi penting karena mengisi “angka” pada laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan menjadi informasi pada pengambilan keputusan yang bermutu.

Pada umumnya basis pencatatan akuntansi di dasarkan pada dua sistem yaitu sistem kas basis (*Cash basis*) dan akrual basis (*Accrual Basis*). Akan tetapi, terdapat pula modifikasi dari kedua sistem tersebut. Penjelasan dari masing-masing basis akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas

Basis kas menurut KSAP (Kajian Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Suryanovi (2008) adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas, transaksi diakui ketika kas diterima atau dibayar tanpa melihat kapan transaksi tersebut timbul/terjadi. Misalkan: Pendapatan diakui ketika uang kas/setara kas diterima bukan ketika hak atas pendapatan tersebut timbul, sedangkan belanja diakui ketika terjadi pembayaran bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. Pada Basis kas pembelian aset jangka panjang tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan.

2. Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Modifikasi akuntansi berbasis kas hampir sama dengan akuntansi berbasis kas, namun basis kas modifikasian pencatatan transaksi untuk satu periode diperpanjang untuk jangka waktu tertentu misalnya satu bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Transaksi yang berasal dari tahun lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran dari periode sebelumnya untuk mengantisipasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Maka dari itu, perhitungan kas dalam periode pelaporan tahun sebelumnya ke periode pelaporan tahun berjalan harus di kurangkan (Ma'um, 2011).

3. Basis Akrua

Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management (NPM)* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kemenkeu, 2014). Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Tudor & Mutiu (2006) berpendapat serupa mengenai definisi basis akrual yaitu pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa. Lebih lanjut Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual sebagai metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat.

4. Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akrual modifikasi merupakan basis akrual dengan sedikit perubahan dalam pengakuan pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan yang "*susceptible to accrual*" yaitu memenuhi unsur *measurable* dan *available*. Apabila pendapatan tidak memenuhi unsur tersebut maka akan diakui pada saat kas diterima (Ma'um, 2011). *Available* berarti tersedia untuk memenuhi

keperluan pembiayaan atas pengeluaran di periode berjalan. *Available* dapat dikatakan jika memenuhi dua kriteria yaitu secara sah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pada tahun berjalan dan akan diterima pada periode berjalan setelah akhir tahun guna untuk membayar utang pada periode berjalan. Sedangkan *Measurable* adalah ketika dapat diukur secara obyektif.

2.2.9 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrua dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 (Satrio, 2016).

2.2.10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.11 Komponen Laporan Keuangan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 perubahan basis akuntansi yang digunakan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada komponen laporan keuangan pemerintahan baik dalam pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga komponen-komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukkan

ketaatan pemerintah terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. laporan realisasi anggaran menyajikan unsur-unsur:

- a. Pendapatan LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Saldo anggaran lebih (SAL) adalah gunggunan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan akan berjalan serta penyesuaian lain yang akan diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih hanya disusun oleh entitas pelaporan, laporan ini menyajikan unsur-unsur:

- a. Saldo anggaran lebih awal periode
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. saldo anggaran lebih akhir periode
- f. lain-lain

3. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode. Laporan operasional disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. unsur-unsur yang disajikan dalam laporan operasional adalah:

- a. Pendapatan LO
- b. Beban dari kegiatan Operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional
- d. Pos luar biasa
- e. Surplus/defisit LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. laporan perubahan ekuitas menyajika pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

5. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca adalah:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldoakhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. unsur-unsur yang disajikan dalam laporan arus kas adalah:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan
- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan

7. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi dari kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.

- c. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama setahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.2.12 Transparansi

Menurut Sabarno (2010) transparansi adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Agar terwujudnya sistem pemerintahan yang baik perlu adanya kemudahan dan keterbukaan untuk masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan dari berbagai indikator lainnya.

Menurut Dwiyanto (2015) mengatakan bahwa transparansi adalah wadah penyediaan informasi tentang pemerintahan untuk masyarakat dan menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam informasi, baik itu informasi terkait kebijakan ataupun terkait keuangan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi.

2.2.13 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mengupayakan terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi telah tumbuh dan lebih strategis disebabkan penggunaan orang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan keunggulan komparatif, baik domestik maupun internasional. (Hasibuan, 2000).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu hal yang harus dimiliki dan sangat penting dalam pencapaian tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Elemen sumber daya seperti modal dan teknologi bukan merupakan elemen utama organisasi dikarenakan yang menjadi elemen utama adalah sumber daya manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu factor yang tidak dapat ditinggalkan dari sebuah organisasi, baik itu perusahaan ataupun institusi. Kunci dari perkembangan perusahaan adalah SDM itu sendiri. Pada dasarnya, SDM adalah manusia yang bekerja untuk sebuah organisasi menjadi penggerak, pemikir, serta perencana agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut. (Robbins, 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian yang terlebih dahulu dilakukan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual. Penulis mengambil penelitian terdahulu dari Penelitian yang dilakukan Andriani (2015) bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menemukan bahwa Undang-Undang Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai perubahan Pasal 36 ayat

(1) PP No 17-2003 dan Pasal 70 ayat (2) PP No.1-2004 telah menginstruksikan pemerintah untuk menerapkan akuntansi akrual oleh tahun 2008. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menerapkan kebijakan keuangan ini secara informal, namun sebenarnya masih menggunakan PP 24- 2005. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian kepustakaan. Hasil implementasi akuntansi akrual di dua pemerintahan publik disesuaikan dengan kerangka konseptual.

Penelitian Najati, Pituringsih, Animah (2016) yang bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi berbasis akrual dengan pengujian determinan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Populasi penelitian adalah 464 operator SAIBA pemangku kepentingan KPPN Makassar I dan II. Sampel yang ditentukan dengan teknik slovin dan cluster sampling sebanyak 82 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah PLS dengan analisis faktor konfirmatori orde kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual dipengaruhi oleh pelatihan akuntansi dan budaya organisasi, tetapi tidak dipengaruhi oleh penggunaan SAIBA. Temuan lainnya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual berimplikasi pada kualitas LKKL.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tirayoh (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Dampak yang hadir karena sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan basis akrual di BPKAD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP No 71 tahun 2010. Dampak yang ditimbulkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual bahwa laporan keuangan ini lebih mudah, cepat dan

terintegrasi, serta dapat mengetahui informasi anggaran yang dikeluarkan dan dapat dipantau langsung oleh pihak manajemen kepada pengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan Erawati dan Kurniawan (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini memiliki 45 kepala dinas, kepala sub bagian, dan staf bagian keuangan di setiap SKPD – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang sebagai responden. Penelitian ini memodifikasi kuesioner dari literatur sebelumnya untuk menghasilkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun, dua variabel independen lainnya (sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi) tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dari kesimpulan beberapa penelitian terdahulu terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, metode penelitian untuk pembahasan ini rata rata menggunakan metode kualitatif dengan melaksanakan wawancara dan observasi lapangan dengan beberapa sumber. Kebanyakan dari penelitian inimerasakan dampak baik dari penerapan akuntansi berbasis akrual di masing- masing daerah tapi masih bergelut dengan kendala-kendala yang belum bisa di hindari.

Perbedaan yang ada pada penelitian penulis kali ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang lebih mengevaluasi hasil dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah Kabupaten Kampar sekaligus menjabarkan kendala dan kekurangan yang ada dimasa sekarang ini sambil memberi beberapa usulan perbaikan yang dirasa akan bermanfaat bilamana

diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPKAD Kabupaten Kampar untuk menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual yang lancar tanpa kendala sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang telah peneliti lakukan pada saat pengumpulan data dan analisis data untuk memberikan hasil yang akurat terkait permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, instrument penelitian, focus penelitian, sistematika penelitian, teknik pengumpulan data serta pengujian data.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument utama penelitian. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Denzim & Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Sugiarto, 1998)

Jenis penelitian kualitatif yang di ambil yaitu metode Studi Kasus. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi dan mempelajari dokumen yang terkait dengan topik yang di teliti (Sugiarto, 2017).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menganalisa lebih dalam mengenai peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Kampar Riau dengan implementasi akuntansi berbasis akrual. Selain itu, hasil akhir dari penelitian ini bukan sekedar data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, namun diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermakna mengenai pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mendalam, serta rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat di deskripsikan secara gamblang yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam menarik suatu kesimpulan sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2014). Penelitikualitatif sebagai human interest, berfungsi menetapkan fokus penelitan, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas penemuannya (Sugiyono, 2014)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dianggap sebagai instrumen yang paling berpengaruh. Sedangkan objek penelitian berfungsi sebagai pembawa pengetahuan dan pendukung dari suatu penciptaan yang baru (Leavy, 2014). Selain itu, peneliti sebagai instrumen utama juga harus menghabiskan waktu di lingkungan yang menjadi objek penelitiannya untuk mengumpulkan serta menganalisis data (Hancock & Algozzine, 2006).

3.4 Fokus Penelitian

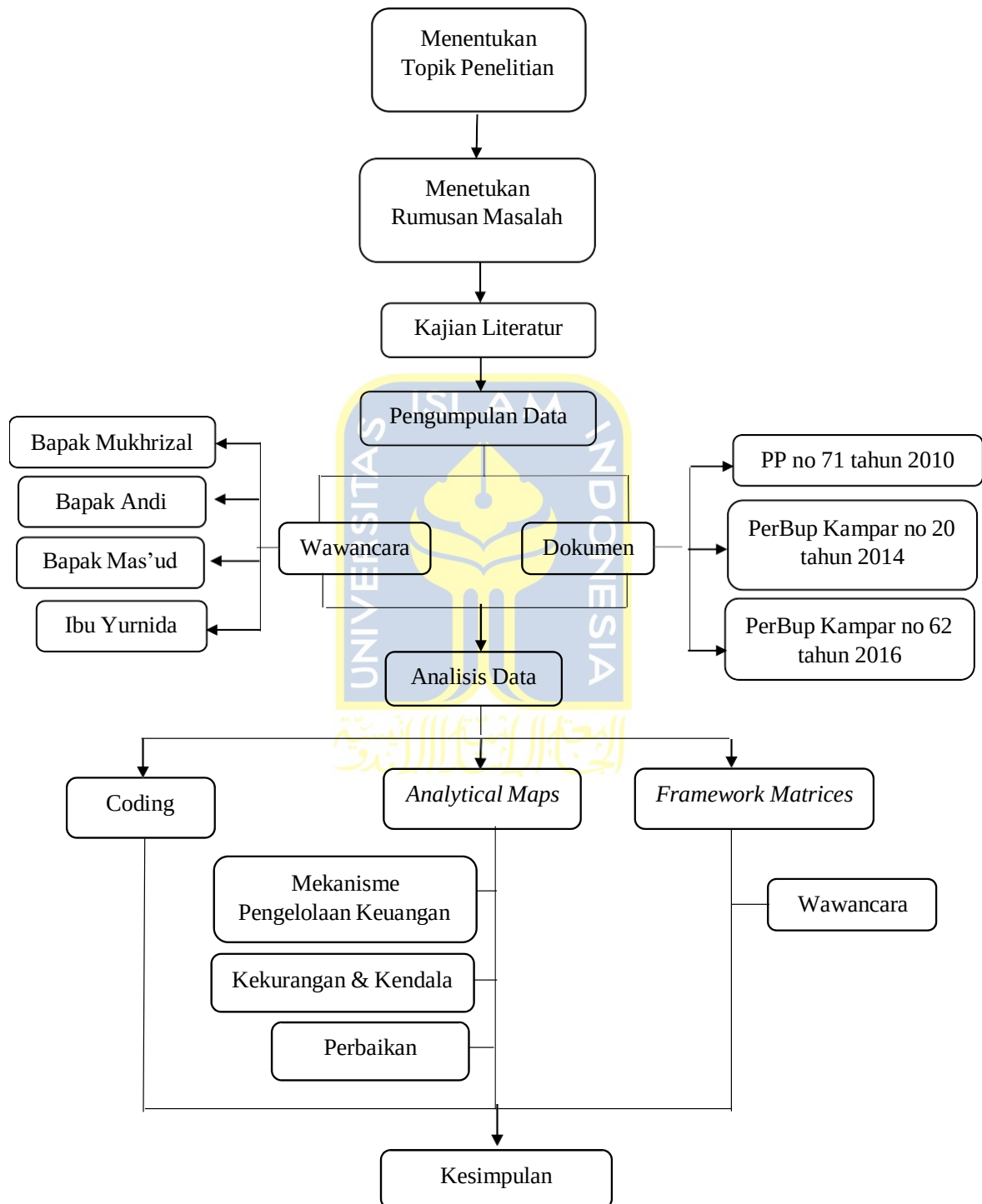
Fokus penelitian adalah membuat batasan pada penelitian agar dapat memilah data yang dihasilkan antara data relevan dan tidak (Moleong, 2010). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Kampar sebelum dan sesudah implementasi akuntansi berbasis akrual.
- b. Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual.
- c. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual.

3.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dari dimulainya penyusunan penelitian, proses pengumpulan data, hingga di hasilkannya kesimpulan. Setiap jenis penelitian memiliki sistematika yang berbeda tergantung dari topik penelitian seperti apa yang diteliti. Sistematika penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1**Sistematika Penelitian**

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mencari topik penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mempelajari jurnal maupun skripsi yang dapat ditemukan di Google Cendikia terkait pembahasan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya peneliti melakukan kajian dan rangkuman pada teori dan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu peneliti melakukan observasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Daerah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengangkat topik mengenai peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kampar dengan implementasi akuntansi berbasis akrual.

3.5.2 Menentukan Rumusan Masalah

Pada saat topik penelitian telah ditentukan, peneliti kemudian menentukan rumusan masalah, dan tiap tiap rumusan masalah memiliki keterikatan antara satu sama lain. Rumusan masalah pertama menjadi dasar untuk menentukan rumusan masalah selanjutnya, dan begitu seterusnya. Pada penelitian ini, peneliti menentukan untuk membahas terkait mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Kampar sebelum dan sesudah implementasi akuntansi berbasis akrual, kekurangan dan kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan

sistem akuntansi berbasis akrual, dan memberikan saran perbaikan dalam meminimalisir terhadap kendala yang terjadi.

3.5.3 Kajian Literatur

Setelah menentukan rumusan masalah, selanjutnya peneliti melakukan studi atau kajian literature yang menjadi acuan dan landasan diadakannya penelitian ini. Kajian literatur ini sudah di bahas pada BAB II.

3.5.4 Pengumpulan Data

Seringkali data bersumber dari data primer dan data sekunder (Hermawan & Amirullah, 2021). Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, baik itu data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Kampar. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mukhrizal, Bapak Andi Suandi, Bapak Mas'ud, dan Ibu Yurnida.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Kampar terdiri dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Bupati Kampar No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar, dan Peraturan Bupati Kampar No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

Peneliti juga melakukan transkrip wawancara yang awalnya berbentuk rekaman audio hingga menjadi berbentuk dokumen.

3.5.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan NVivo dengan *software* NVivo 12. NVivo ini merupakan *software* analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh *Qualitative Solution and Research (QSR) international*. QSR adalah perusahaan pertama yang mengembangkan *software* analisa data kualitatif. NVivo awalnya bermula dari *software* NUD*IST (*nonnumeric Unstructured Data, Index Searching, and theorizing*) pada tahun 1981 (Bazeley & Jackson, 2013) Adapun tipe NVivo yang digunakan dalam analisa data yaitu NVivo 12. Peneliti menggunakan *software* ini karena cara kerja dari *software* ini memudahkan peneliti dalam mengimpor teks atau transkrip wawancara, rekaman wawancara, dan dokumen-dokumen yang berbentuk pdf yang nantinya membentuk pola dari semua sumber data kualitatif tersebut. Namun, untuk pembahasan dan kesimpulan kembali pada kemampuan peneliti tersebut.

3.5.5.1 Coding

Coding adalah tugas mendasar di sebagian besar proyek kualitatif yang melibatkan pengumpulan semua materi tentang tema atau kasus tertentu ke dalam *node* untuk diekplorasi lebih lanjut (*About Coding, 2017*).

Data yang berisi transkrip, wawancara, dan peraturan-peraturan kemudian dimasukkan kedalam NVivo dan dipisahkan dengan menggunakan folder masing-masing. Kemudian peneliti juga membuat node dalam bentuk *case*. *Case nodes* diberi nama sesuai nama narasumber dan peneliti membuat *case classifications* yang berisikan informasi terkait narasumber pada setiap *case nodes* yang telah dibuat. *Case Classifications* berisikan jenis kelamin, jabatan, pendidikan, serta kelompok umur. Lalu, data yang berada di *source* di *coding* ke dalam *case nodes* sesuai dengan klasifikasinya. Pembuatan *nodes* mengacu pada tiga rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti juga memuat *relationship* untuk menghubungkan *nodes* yang saling terkait. *Relationship* ini juga bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara kekurangan dan kendala, kendala dan saran perbaikan. Setiap *nodes* dan *relationships* harus di *coding* sehingga *node* dan *relationship* terisi.

3.5.5.2 Analytical Maps

Maps adalah alat visualisasi yang memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi ide-ide atau untuk menyajikan koneksi dalam data (About Maps, 2021)

Analytical maps dibuat setelah melakukan *coding* dan bertujuan untuk menggambarkan model penelitian terhadap setiap rumusan masalah yang telah ditentukan (James, 2013). Peneliti membuat empat *analytical maps* mengenai pengelolaan keuangan daerah sebelum penerapan implementasi akuntansi berbasis akrual, pengelolaan keuangan daerah

sesudah penerapan implementasi berbasis akrual, kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, dan saran perbaikan untuk meminimalisir kendala yang terjadi. *Nodes*, *case nodes*, serta *relationships* antar *nodes* terdapat dalam *maps* ini.

3.5.5.3 Framework Matrices

Framework Matrices adalah kerangka yang digunakan untuk membantu meringkas materi sumber yang digunakan dan menjelaskancara bekerja dengan sumber yang digunakan (*About Framework Matrices*, 2017).

Framework Matrices merupakan salah satu hasil proses *coding*. *Framework Matrices* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *framework matrices* wawancara dan *framework matrices* dokumen. *Framework matrices* memuat tabel yang menunjukkan hasil proses *coding* dari semua *internal sources* yang digunakan sebagai referensi, dan dikelompokkan menurut hasil wawancara atau dokumen.

3.5.6 Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan semua data yang reliabel dan valid serta sudah dianalisis. Realibitas data sangat penting dalam penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 2010.)

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Menginterpretasikan pola hubungan dalam coding serta membandingkan antar pola hubungan sangat

diperlukan dalam proses ini. Tujuan dari penarikan kesimpulan ini untuk mengetahui hasil pembahasan secara garis besar.

3.6 Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif juga dapat berupa pembicaraan lisan, tulisan dalam rapat, kebijakan dan peraturan pemerintah, hingga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat (Afrizal, 2014)

3.6.1 Sumber Data Primer

3.6.1.1 Wawancara

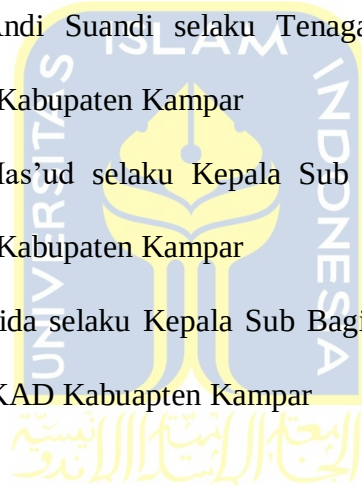
Wawancara dilakukan dengan dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2010). Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui sumber yang mendalami situasi dan lebih mengetahui akan informasi yang sedang diperlukan oleh pewawancara.

Pertanyaan yang diberikan kepada para narasumber adalah terkait peningkatan akuntabilitas dan transparansi di BPKAD Kabupaten Kampar sebelum dan sesudah pengimplementasian

akuntansi berbasis akrual, serta pertanyaan tentang kendala dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual.

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai partisipan yang berjumlah empat orang dan memiliki pengetahuan serta pemahaman materi terkait pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kampar. Adapun partisipan yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bapak Mukhrizal selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Kampar
2. Bapak Andi Suandi selaku Tenaga Ahli Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Kampar
3. Bapak Mas'ud selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Kampar
4. Ibu Yurnida selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset pada BPKAD Kabupaten Kampar



Tabel 3.1
Profil Partisipan Wawancara

Narasumber	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan	Kelompok Usia (Tahun)	Lama Bekerja (Tahun)
Bapak Mukhrizal	Laki-laki	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	S1	36-40	11-15
Bapak Andi Suandi	Laki-laki	Tenaga Ahli Akuntansi/ Supervisi SIPKD	DIII	36-40	11-15
Bapak Mas'ud	Laki-laki	Kepala Sub Bidang Pelaporan	S2	41-45	16-20
Ibu Yurnida	Perempuan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	S2	51-55	31-35

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar Riau

3.6.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai penguat sumber data primer. Sumber data sekunder dapat berasal dari peraturan pemerintah, publikasi peraturan, artikel jurnal dan internet. Pengumpulan dokumen digunakan untuk mencari kecocokan antara informasi yang di berikan dengan peraturan yang ada (Siyoto, 2015). Berikut dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
2. Peraturan Bupati Kampar No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar.

3. Peraturan Bupati Kampar No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar

3.7 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar Riau khususnya pada bidang akuntansi dan pelaporan. Objek penelitian ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kampar.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan narasumber dan dokumen yang terkait dengan rumusan masalah (Kawasati, 2016). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi data mengenai mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah implementasi berbasis akrual maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset serta Tenaga Ahli Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Kampar.

2. Untuk mendukung sumber data primer berupa hasil wawancara, maka peneliti juga mencari dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kampar.

3.9 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji keabsahan data melalui dua metode, yaitu melalui uji kredibilitas dan uji reliabilitas. Pada uji kredibilitas peneliti menguji keabsahan data dengan cara peningkatan ketekunan, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh. Selain itu peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti.

Pada pengumpulan data peneliti juga menggunakan triangulasi dalam pengujian keabsahan datanya. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik. Teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2014). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang ada pada subjek penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2014). Peneliti melakukan wawancara berulang kali dengan beberapa pertanyaan yang sama.

Peneliti juga menggunakan *software* NVivo untuk melakukan uji keabsahan data. *Software* NVivo membantu peneliti dalam mencari dan menghubungkan sumber *sources* maupun hasil *coding* dengan *nodes*. Peneliti juga membuat *Framework Matrices* yang berguna untuk memetakan apa yang sudah peneliti coding sejak tahap awal. *Framework Matrices* dapat mempermudah peneliti dalam membuktikan validitas karena semua yang peneliti tulis sudah ada pada *framework matrices*. Hasil dari *framework matrices* ini berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Baris pada tabel sebagai *case node* dan kolom pada tabel sebagai tema dari *node*. Pada penelitian ini, peneliti membuat *framework*

matrices yang berisi sumber data wawancara dan narasumbernya. Pada baris tabel berisi narasumber, sedangkan kolom tabel berisi *node* hasil dari *coding*. Tabel *framework matrices* yang dibuat peneliti adalah wawancara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini menjabarkan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar mengenai peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kampar dengan implementasi akuntansi berbasis akrual. Pertama, peneliti menjabarkan profil dari BPKAD Kampar sebagai objek penelitian. Kemudian, peneliti menjabarkan jawaban atas rumusan masalah yang sudah diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini.

4.2 Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Kampar

4.2.1 Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Kampar

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu instansi yang berada di dalam struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kampar. BPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. BPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. BPKAD juga menyelenggarakan fungsi seperti penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah; pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Kampar

a. Visi BPKAD Kabupaten Kampar

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Profesional serta terkendali secara berkelanjutan Tahun 2023”

b. Misi BPKAD Kabupaten Kampar

“Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur yang Profesional dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

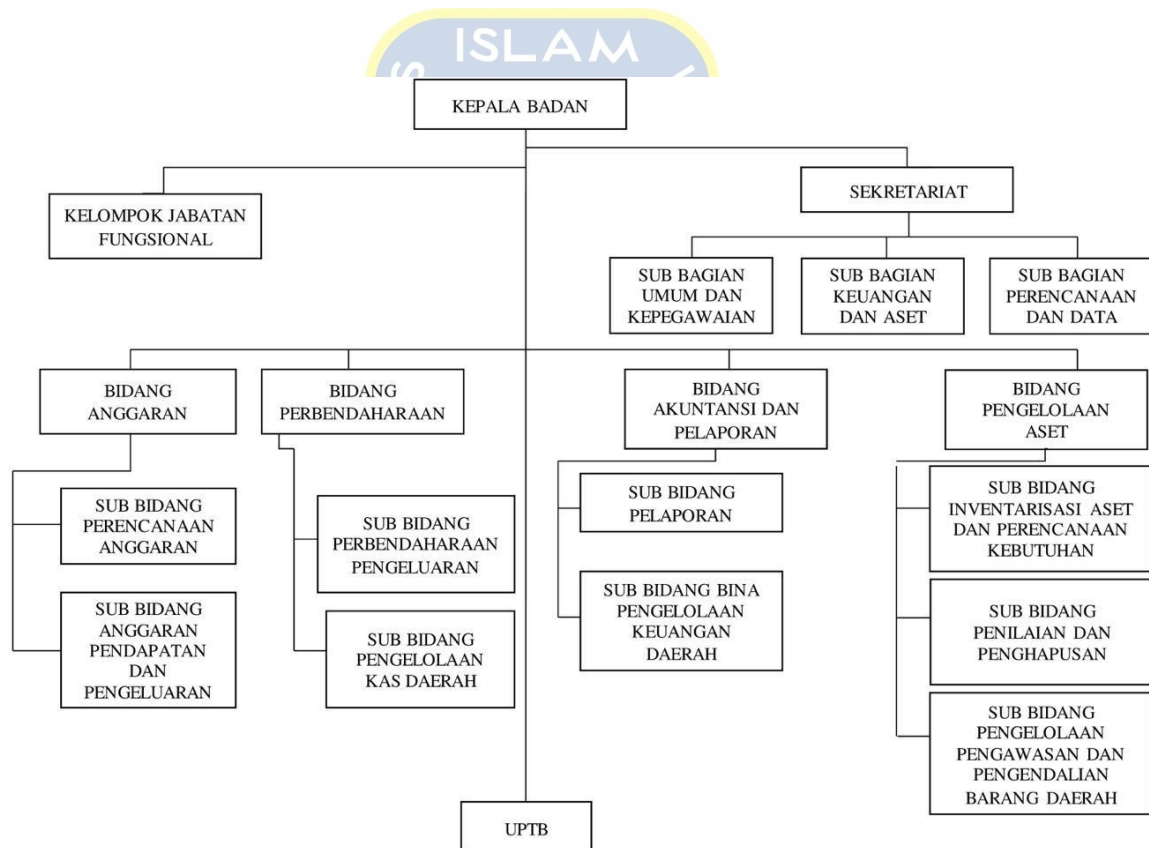
4.2.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kampar

Untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan kerja pegawai diperlukan sebuah struktur organisasi dalam perusahaan. Sebuah perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil tentu saja sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan, dimana sktruktur organisasi ini memberikan penjelasan tentang semua

kedudukan atau jabatan-jabatan yang di emban oleh para pegawai agar mengetahui tugas dan batasan pekerjaan serta kepada siapa pegawai tersebut bertanggung jawab, sehingga akhirnya aktivitas organisasi akan berjalan lancar dan tepat serta baik tanpa ada kendala yang timbul. Untuk memperjelas pada gambar 4.1 di tampilkan gambar struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kampar



Sumber: PerBup Kampar No 62 Tahun 2016

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2016 deskripsi tugas Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdiri dari:

a. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah. Selain itu kepala badan juga menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut: perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi misi daerah; pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan.

b. Sekretariat

Pada bidang Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, mengelola administrasi asset dan menatausahakan kegiatan lainnya. Selain itu sekretaris juga menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut: menyusun dan menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kampar; menyusun rencana anggaran, perbendaharaan,

pelaksanaan akuntansi, pengelolaan asset serta gaji dan tunjangan pegawai.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusutan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

d. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam penatausahaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mencapai akuntabilitas keuangan daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

e. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data. Selain itu sub bagian perencanaan dan data juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas; melakukan *study* dan survey/identifikasi kegiatan teknis dan

sarana dengan institusi terkait; serta mengkoordinir/merumuskan program/kegiatan dengan institut terkait.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bidang anggaran. Selain itu bidang anggaran juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; mengkoordinasikan pengumpulan data, informasi, permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis di bidang anggaran.

g. Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan anggaran. Selain itu sub bidang perencanaan anggaran juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: merencanakan kegiatan bidang perencanaan anggaran berdasarkan kegiatan subbid perencanaan anggaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan subbid perencanaan anggaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; serta membagi tugas atau

kegiatan kepada para bawahan di subbid perencanaan anggaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.

h. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pengeuaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi anggaran penerimaan serta pengendalian anggaran. Selain itu sub bidang anggaran pendapatan dan pengeluaran juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program kegiatan dalam hal anggaran penerimaan/pendapatan serta pengeluaran; penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembiayaan untuk rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

i. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) di bidang perbendaharaan. Selain itu bidang perbendaharaan juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas; membayar uang guna pembayaran pengeluaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung atas beban rekening kas umum daerah.

j. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran

Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perbendaharaan serta membantu kepala bidang penatausahaan atas semua transaksi penerbitan SP2D kedalam register. sub bidang perbendaharaan pengeluaran juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: merencanakan kegiatan subbid perbendaharaan pengeluaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; dan Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di subbid perbendaharaan pengeluaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.

k. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok mengusahakan, mengatur dana, menyimpan uang daerah dan memantau pelaksanaan penerimaan dana dan pengeluaran APBD. sub bidang pengelolaan kas daerah juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang daerah; serta memantau pelaksanaan penerimaan dana dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.

l. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bidang akuntansi dan pelaporan. Bidang ini juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: melaksanakan peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan; mengkoordinasikan penyusunan regulasi atau kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan di bidang akuntansi dan pelaporan agar tercapai sinkronisasi dalam implementasinya.

m. Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan kajian mengenai pelaksanaan pengelolaan dan keuangan daerah, dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable.

n. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bidang pengelolaan aset.

o. Sub Bidang Inventarisasi Aset dan Perencanaan Kebutuhan

Pada Sub bidang ini dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan evaluasi serta koordinasi inventarisasi asset dan perencanaan kebutuhan.

p. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan

Pada Sub Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penilaian dan penghapusan.

q. Sub Bidang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Daerah

Pada Sub Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok mengelola, mengawasi dan pengendalian terhadap barang milik daerah.

4.3 Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Kampar Riau Sebelum dan Sesudah Implementasi Berbasis Akrual

Permasalahan terkait kinerja pemerintah daerah selalu menjadi perhatian masyarakat karena pemerintah belum menunjukkan hasil yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Penilaian kinerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya, dan membuat keputusan/kebijakan untuk

mencapai akuntabilitas organisasi dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Fenomena lain terkait kinerja pemerintah daerah adalah terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sehingga penilaian kinerja dari pemerintah daerah ini masih cukup menerima banyak kategori CC dan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, menentukan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran, menentukan kegiatan (program dan kegiatan) yang mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran, dan menetapkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran/sasaran;

Kinerja pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Prestasi kerja memberikan manfaat dalam memantau dan menciptakan kemajuan serta tetap fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas masyarakat. Akuntabilitas diperlukan untuk mengukur atau menilai kinerja pemerintah terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas di sektor keuangan menuntut pemerintah untuk merespon masyarakat atas penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya karena adanya persepsi bahwa pemerintah tidak efisien dan memiliki kinerja yang buruk dalam memberikan pelayanan.

Selain akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan keuangan pemerintahan karena transparansi memungkinkan publik mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi memberikan gambaran umum untuk menilai apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana pelaksanaannya, dan bentuk umum akuntabilitas kepada warga negara dan pemangku kepentingan. Argumen-argumen di atas memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah menuntut pemerintah untuk memberikan akuntabilitas dan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah berupaya memberikan kinerja terbaik kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2016, pengelolaan keuangan daerah di amanat kan kepada instansi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

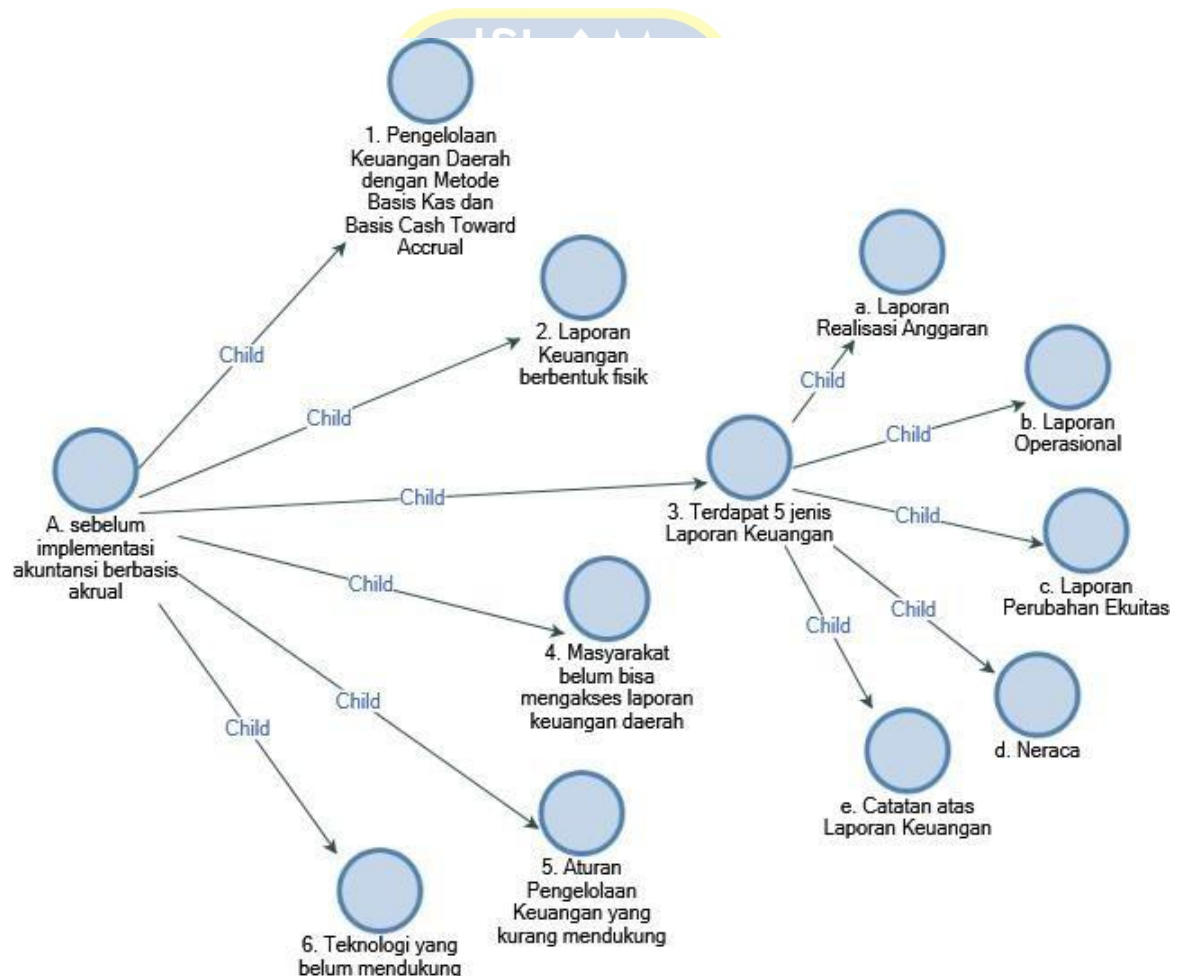
4.3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh BPKAD Kampar sebelum penerapan SAP berbasis akrual

Mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang di jalankan oleh BPKAD Kampar sebelum Implementasi Berbasis Akrual akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.2

Peta Analisa Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual



Sumber: Data Diolah melalui Software NVivo12

4.3.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dengan metode Basis Kas

Menurut Bapak Mukhrizal (2022) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengatakan sebelum di terapkan nya Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan metode kas basis, dimana laporan yang dihasilkan berdasarkan uang yang sudah dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima sebagai pendapatan (TBP/STS) dan diakui sebagai realisasi.

Menurut Ibu Yurnida (2022) selaku Kepala sub bagian Keuangan dan Asset mengatakan pada akuntansi berbasis kas, pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika dana telah di debit atau di kreditkan.

Menurut Bapak Mas'ud (2022) selaku kepala Sub Bidang Pelaporan mengatakan bahwa pencatatan yang dilakukan pada metode akuntansi berbasis kas ini yaitu pencatatan dilakukan hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas.

Basis kas yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang. Tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Contohnya, jika seseorang menerima pendapatan dari perusahaan lainnya, tetapi uangnya akan diterima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Karena ini tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan.

4.3.1.2 Laporan Keuangan Berbentuk Fisik

Bapak Andi Suandi (2022) selaku Tenaga Ahli pada BPKAD Kampar mengatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.

Pada masa ini, tidak semua orang bisa mengakses laporan keuangan daerah dikarenakan laporan keuangan tersebut masih dalam bentuk buku dimana hanya beberapa orang yang berkepentingan yang bisa mengaksesnya seperti pegawai lingkup pemerintah daerah. Sehingga transparansi dalam laporan keuangan belum bisa dirasakan oleh masyarakat luas disebabkan masih kurangnya akses teknologi dan informasi yang dimiliki daerah.

4.3.1.3 Terdapat 5 Jenis Laporan Keuangan

Menurut PP no 71 tahun 2010 terdapat 5 jenis laporan keuangan pada basis kas yang diterapkan di Kabupaten Kampar, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 2) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 3) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada

suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai penambahan dan pengurangan ekuitas Instansi dalam periode tertentu, beserta penyebab terjadinya perubahannya.

d. Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet* atau *statement of financial position*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

4.3.1.4 Masyarakat Belum Bisa Mengakses Laporan Keuangan Daerah

Menurut Bapak Andi (2022) Transaparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.

Menurut Bapak Mas'ud (2022) selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan mengatakan bahwa untuk laporan keuangan tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang atau entitas yang memiliki kepentingan.

Transparansi informasi keuangan pemerintah daerah pada masa basis kas di Kabupaten Kampar cenderung masih rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan teknologi sehingga masyarakat tidak bisa mengakses nya secara bebas.

4.3.1.5 Aturan Pengelolaan Keuangan yang Kurang Mendukung

Sejak Indonesia Merdeka hingga tahun 2003, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia masih mengadopsi aturan dari Belanda yaitu *Indonesische Comptabiliteitswet Stbl. 1864 No. 106*. Dalam Bahasa Indonesia aturan ini dikenal sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia – Pengaturan Tentang Cara Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Republik Indonesia.

ICS 1864 No. 106 diundangkan kembali terakhir kali dalam S. 1925 No. 448. Selanjutnya pada Tahun 1954 diterbitkan perubahan atas aturan ini dalam UU Darurat Nomor 3 Tahun 1954 dan terakhir kalidiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Sehingga kurang nya aturan pendukung dalam pengelolaan keuangan daerah (Andi, 2022)

4.3.1.6 Teknologi yang Belum Mendukung

Menurut Bapak Andi Suandi (2022) selaku Tenaga Ahli pada BPKAD Kampar mengatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan belum terbuka dikarenakan kurang nya teknologi yang mendukung.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditasi diperlukan sebuah teknologi dan informasi agar bisa diakses oleh masyarakat luas.

4.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh BPKAD

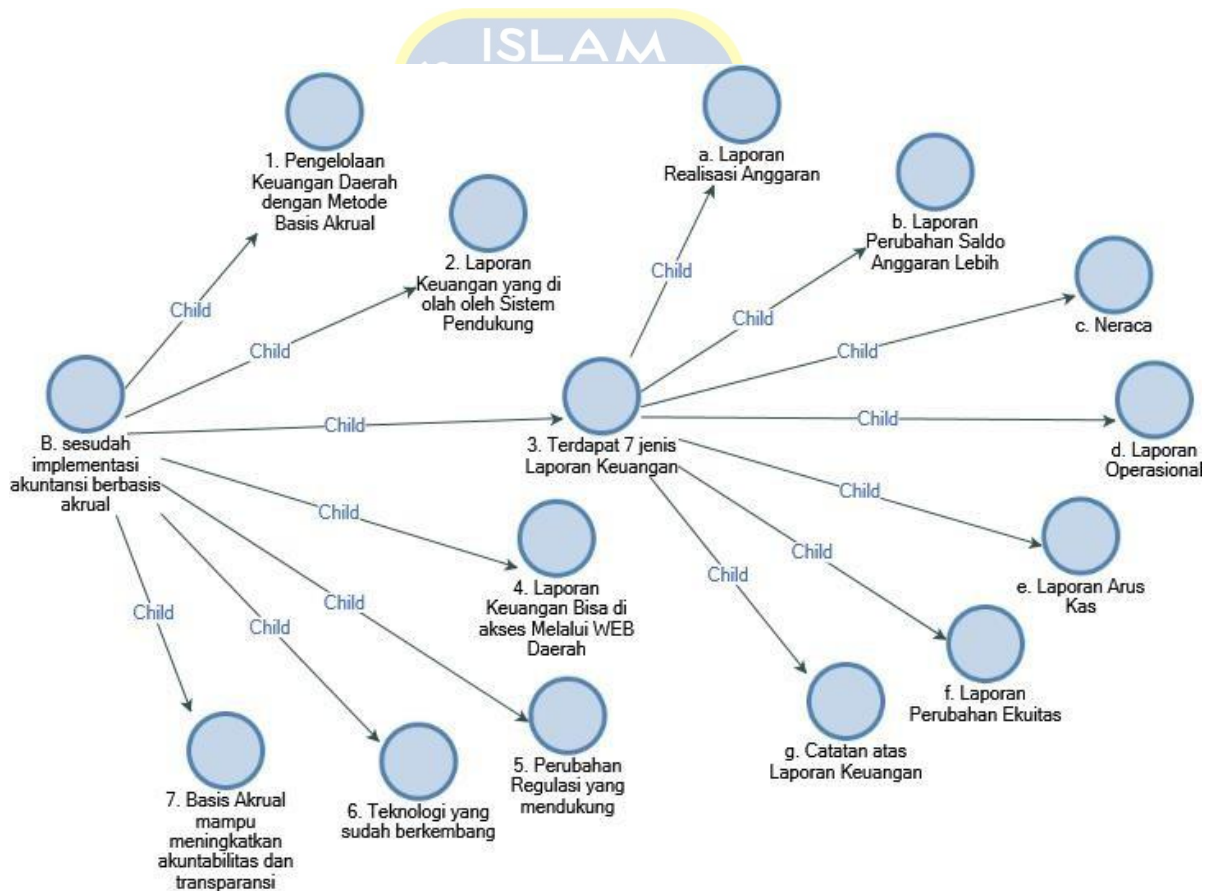
Kampar sesudah penerapan SAP berbasis akrual

Mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang di jalankan oleh BPKAD Kampar sesudah Implementasi Berbasis Akrual akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.3

Peta Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Sesudah

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual



Sumber: Data Diolah melalui Software Nvivo12

4.3.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dengan metode Basis Akrua

Menurut Ibu Yurnida (2022) selaku Kepala sub bagian Keuangan dan Asset mengatakan bahwa dengan metode akuntansi berbasis akrual transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau saran akas diterima ataupun dibayar.

Menurut Bapak Andi Suandi (2022) selaku Tenaga Ahli mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah bertransformasi dari basis kas ke basis akrual. Dimana ada beberapa perubahan dalam mekanisme pertanggungjawaban, yaitu ada beberapa penerimaan kas sudah dicatat sebagai piutang jika ada surat ketetapan pajak/retribusi, kemudian timbul piutang jika sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan keduanya masuk pada komponen Neraca. Jika sebelumnya dicatat setelah dana cair.”

Mulai dari tahun 2015 Implementasi SAP Berbasis Akrua di Kabupaten Kampar dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (*Cash Toward Accrual Basis*) menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. Yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual.

4.3.2.2 Laporan Keuangan yang di olah oleh Sistem Pendukung

Menurut Bapak Andi Suandi (2022) selaku Tenaga Ahli pada BPKAD Kampar mengatakan Dengan adanya perkembangan teknologidan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD, pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat. Dan pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan. Pengelolaan Keuangan juga di bantu oleh sebuah sistem pendukung yang bernama SIPKD.

Oleh sistem pendukung tersebut, informasi keuangan dan non keuangan disajikan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam sistem pendukung secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. Sistem pendukung tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

4.3.2.3 Terdapat 7 jenis Laporan Keuangan

Menurut PP no 71 tahun 2010 terdapat 7 jenis laporan keuangan pada basis akrual yang diterapkan di Kabupaten Kampar, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- 4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Arus Kas; Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 2) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 3) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai penambahan dan pengurangan ekuitas Instansi dalam periode tertentu, beserta penyebab terjadinya perubahannya.

f. Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet* atau *statement of financial position*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

4.3.2.4 Laporan Keuangan Bisa Diakses di Website

Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD, pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat. Dan pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan (Andi,2022)

Hal diatas dibuktikan dengan adanya laporan keuangan website resmi BPKAD kabupaten Kampar dengan alamat URL <https://bpkad.kamparkab.go.id/visi-dan-misi/> yang bisa diakses segala kalangan dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

4.3.2.5 Perubahan Regulasi yang Mendukung

Menurut Bapak Andi Suandi (2022) selaku Tenaga Ahli mengatakan bahwa Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual Pada Pemerintah Daerah, juga mengharuskan bagi daerah untuk segera mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebjiakan Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yangmana hal ini di tegaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Pasal 10 Peraturan Kepala Daerah yang dimaksud harus ditetapkan paling lambat 31 Mei 2014.

Sebagai dasar pelaksanaan implementasi akuntansi berbasis akrual.Oleh karena itu Tahun anggaran 2015 tercatat sebagai sejarah dalam akuntansi sektor publik di Indonesia terkait Penyusunan laporan keuangan.Perioda ini merupakan pengalaman pertama Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Kampar melalui BPKAD menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

4.3.2.6 Teknologi yang Sudah Berkembang

Dalam Implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Kampar, tentunya pemanfaatan teknologi dan SDM berperan penting didalamnya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasar-kan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan sedangkan Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Seperti yang dikatakan Bapak Andi (2022) bahwa dengan adanya perkembangan teknologi maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan sudah bisa diakses oleh masyarakat.

4.3.2.7 Basis Akrual Mampu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Bapak Mukhrizal (2022) Selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengatakan bahwa alhamdulillah dari regulasi dan penerapan saat ini kita ada penilaian dari tim audit dan itu kita memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sejak diterapkan nya sistem akuntansi berbasis akrual ini selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Menurut Bapak Andi (2022) selaku Tenaga Ahli pada BPKAD Kampar mengatakan bahwa dengan dilakukannya atau diimplementasikannya akuntansi berbasis akrual alhamdulillah kabupaten Kampar sudah mencapai target wajar tanpa pengecualian dimana kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih disiplin, kemudian dipermudah dengan adanya aplikasi yang mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

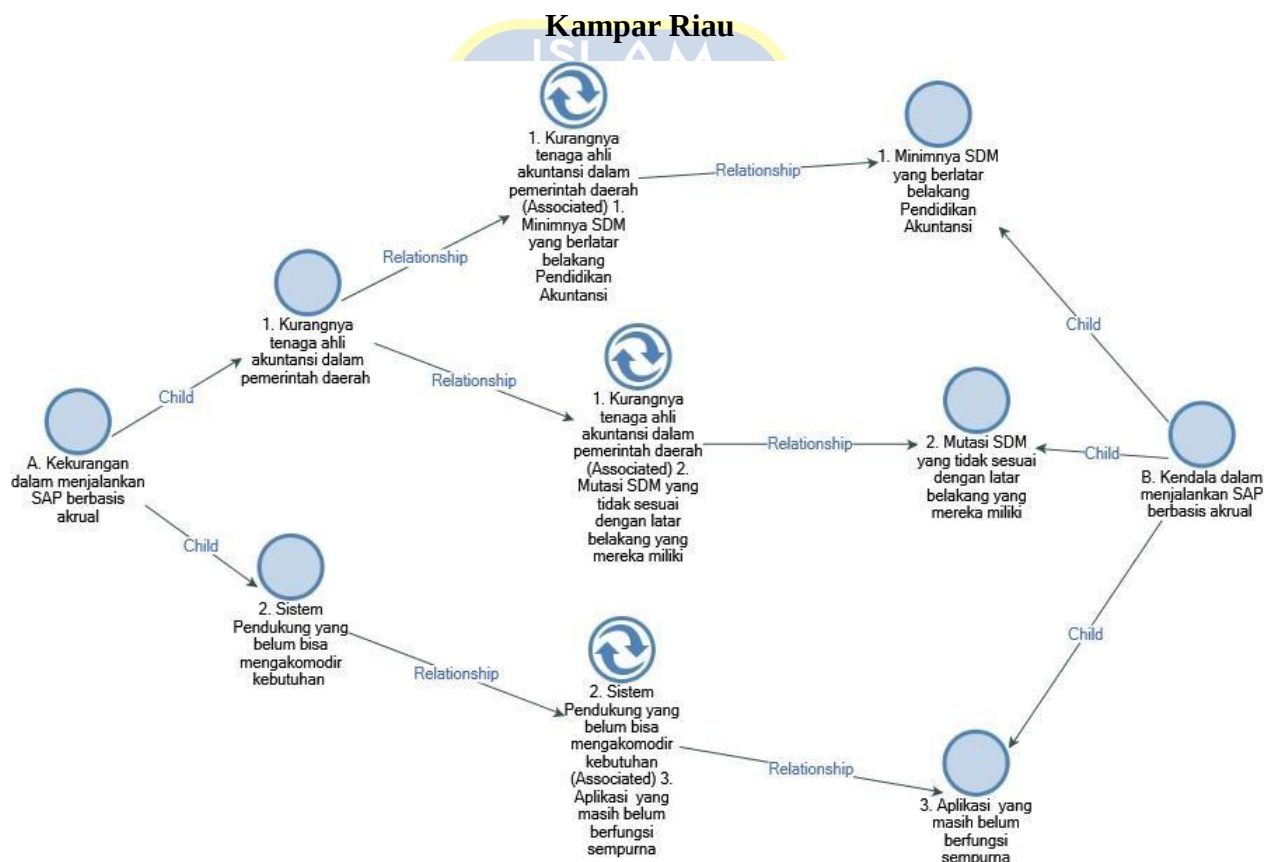
Penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Kampar oleh BPKAD diharapkan menjadi sarana untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, dimana mulai dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa mengakses data yang akan masuk di APBD, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat serta pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan. Tentunya hal diatas tak lepas dari faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi SAP berbasis Akrual ini yakni dari pemahaman SDM tersedia dan juga regulasi aturan daerah yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangan.

4.4 Kekurangan dan Kendala Dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua di Kabupaten Kampar Riau

Kekurangan dan Kendala yang dihadapi dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua di BPKAD Kabupaten Kampar akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4.4

Peta Analisa Kekurangan dan Kendala Dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua di Kabupaten



Sumber: Data Diolah melalui Software Nvivo 12

4.4.1 Kekurangan Dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah(SAP) Berbasis Akrua di BPKAD Kabupaten Kampar Riau

Standar akuntansi pemerintahan akrual diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Keuntungan dari SAP berbasis akrual yang telah diterapkan di Kabupaten kampar dapat diringkas sebagai berikut. Akuntansi akrual lebih relevan dalam menilai kapasitas arus kas suatu entitas.

Relevansi akuntansi ditunjukkan dalam Kinerja Keuangan, Kondisi Keuangan dan Memprediksi Arus Kas. SAP berbasis akrual memberikan informasi kepada pengguna tentang entitas sumber daya, biaya pelaksanaan operasi (atau biaya penyediaan layanan kepada publik), dan informasi lain yang terkandung dalam posisi keuangan dan perubahannya, serta informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah entitas telah beroperasi secara ekonomis dan efisien

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan Kabupaten Kampar sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi penerapan akuntansi berbasis akrual (Mukhrizal, 2022) Berikut beberapa kekurangan yang terdapat pada proses implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Kampar.

4.4.1.1 Kurangnya Tenaga Ahli Akuntansi dalam Pemerintah

Daerah di Kabupaten Kampar

Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Kampar. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang kurang cocok dalam bidang keuangan dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Bukan tanpa alasan, kekurangan tenaga ahli akuntansi di Kabupaten Kampar sering merepotkan dan memberatkan kepada tenaga yang mempunyai pemahaman terkait akuntansi karena di kantor BPKAD Kampar tersebut hanya beberapa orang yang paham akan penerapan SAP berbasis akrual ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mukhrizal (2022) Selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang mengatakan bahwa:

“kendala kita adalah kekurangan tenaga akuntansi dalam pemerintah daerah sehingga kita merepotkan dan memberatkan kepada beberapa orang yang mengerti akuntansi karena hanya beberapa orang mengerti penerapan akuntansi berbasis akrual jadi seolah-olah pekerjaan itu menumpuk hanya pada sebagian orang saja, jadi lebih banyak bersantai daripada bekerja, jadi itu kendala kita kekurangan Sumber Daya Manusia “

4.4.1.2 Sistem Pendukung yang Belum Bisa Mengakomodir

Kebutuhan

Infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu

sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah. kendala kita mungkin aplikasi pendukung yang mestinya betul betul secara 100% bisa mengakomodir seluruh seluruh kebutuhan kita namun nyata nya aplikasi kita belum sempurna (Mukhrizal, 2022)

Apabila kualitas sistem teknologi informasi yang mempunyai keterbatasan data seperti ketidakmampuan sistem informasi untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat dan *up-to-date*, secara efektif maka akan menjadi hambatan utama untuk melaksanakan sistem akuntansi. Dengan teknologi informasi yang lebih maju akan lebih membantu menerapkan sistem akuntansi manajemen yang baru dari pada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

4.4.2 Kendala Dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di BPKAD Kabupaten Kampar.

Dalam akuntansi pemerintahan daerah, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Dalam pengimplementasian-nya, terdapat beberapa kendala

yang menyebabkan kurangnya SDM terkait Akuntansi dan minimnya sistem pendukung. Kendala yang muncul dalam proses penerapan SAP berbasis akrual oleh BPKAD Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

4.4.2.1 Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berlatar

Belakang Pendidikan Akuntansi

SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SAP dan SPIP adalah manusia. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta paham tentang akuntansi pemerintahan yang mana notabennya harus berasal dari jurusan yang linear yaitu akuntansi (Andi, 2022)

Permasalahannya, menemukan SDM lulusan Akuntansi yang kompatibel dan kompeten di Kabupaten Kampar merupakan salah satu kesulitan yang masih dialami BPKAD dalam penerapan SAP berbasis akrual. Mayoritas pegawai di Kantor BPKAD Kabupaten Kampar bukan merupakan lulusan Akuntansi. Kini, SDM yang masih tersedia gencar diberikan pelatihan-pelatihan yang diharapkan dapat bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan SAP berbasis akrual ini.

4.4.2.2 Mutasi Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Dengan

Latar Belakang Pendidikan

Menurut Bapak Mukhrizal (2022) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengatakan bahwa kendala yang paling banyak ya pada

SDM, karena tiap tahun SDM ada pergantian itu yang menjadi kendala karena harus ada proses pembelajaran lagi untuk mereka yang baru-baru.

Faktor sumber daya manusia untuk latar belakang pendidikan dan staf akuntansi dalam hal ini adalah dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari staf akuntansi, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan basis akrual, hal ini sejalan dengan penempatan pegawai di beberapa daerah, Kota/Kabupaten di Indonesia yang tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan sehingga masih sulit bagi aparat daerah Kabupaten Kampar untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP yang berlaku, hal ini terutama disebabkan karena pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah terutama kabupaten Kampar diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

4.4.2.3 Aplikasi yang Masih Belum Berfungsi Sempurna

Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh hasil pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat dalam rangka

menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menciptakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini dibuat dengan berbasis pada regulasi pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia.

Namun Aplikasi yang bernama SIPKD ini masih belum sempurna seperti yang dikatakan Oleh Bapak Mukhrizal (2022) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang mengatakan:

“ karena aplikasi lama (SIPKD) yang sudah digunakan belum 100% berfungsi, namun di datangkan lagi aplikasi baru dari kemendagri yang bernama SIPD tetapi aplikasi tersebut masih dalam proses penyempurnaan. “

Aplikasi SIPKD ini mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumberdaya manusia yang kurang, kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, kesalahan patokan data, kesalahan input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan

terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya. Namun permasalahan permasalahan yang ada belum teratasi sudah di datangkan lagi aplikasi yang baru dari Kemendagri yang bernama SIPD dan Aplikasi SIPD ini juga masih dalam tahap proses penyempurnaan.

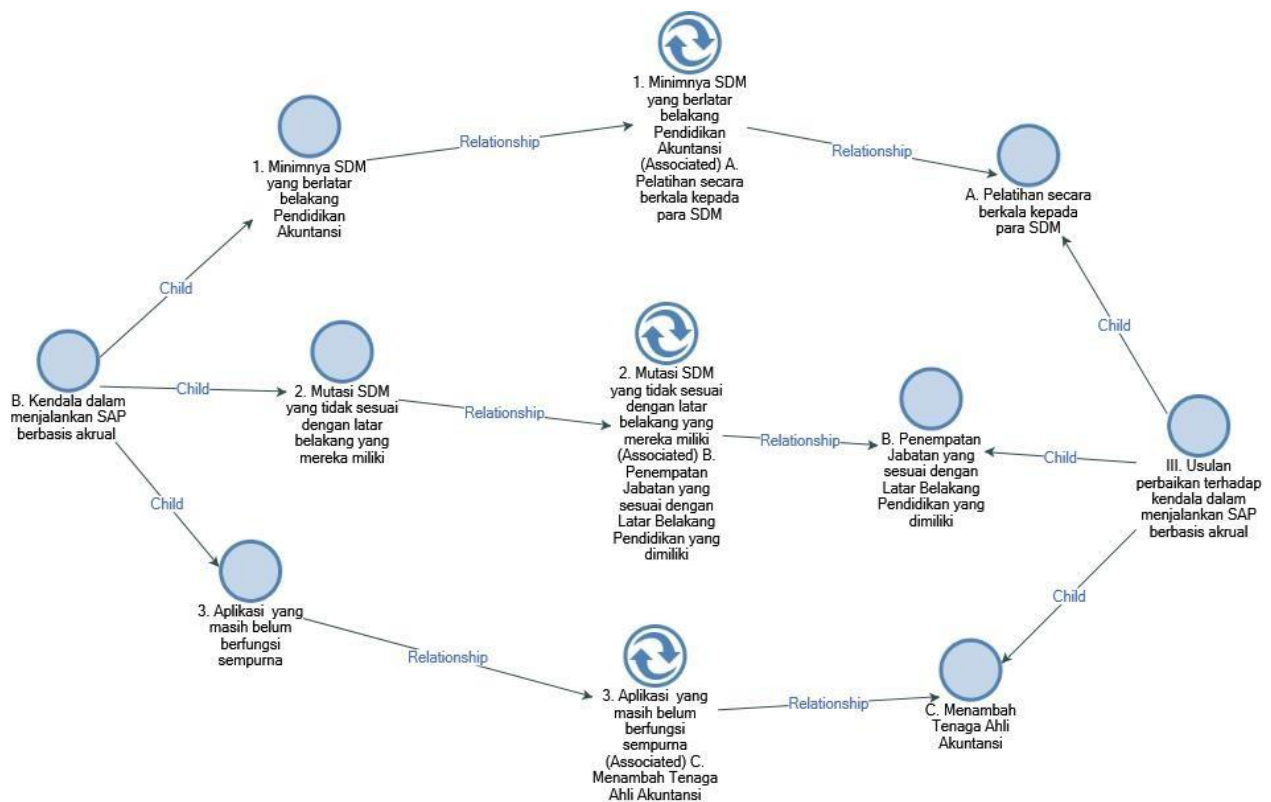


4.5 Usulan Perbaikan Terhadap Kendala Dalam Menjalankan SAP Berbasis Akrua

Perbaikan yang dilakukan terhadap kendala dalam menjalankan akuntansi berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Kampar akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4.5

Peta Analisa Usulan Perbaikan Terhadap Kendala Dalam Menjalankan SAP Berbasis Akrua



Sumber: Data Diolah melalui Software Nvivo 12

4.5.1 Pelatihan Secara Berkala Kepada Sumber Daya Manusia (SDM) di BPKAD Kabupaten Kampar

Perbaikan Pertama yang dapat dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar dalam mengatasi kendala yaitu melakukan pelatihan secara berkala kepada SDM yang ada di BPKAD Kabupaten Kampar.

Bapak Mukhrizal (2022) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengatakan bahwa dilakukannya bimbingan teknis, pada awal-awal pengimpelementasian hampir setiap tahun diadakan terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan, kemudian penggunaan aplikasi, dan pemahaman akuntansi dasar.

Pelatihan dibentuk bertujuan untuk menciptakan kemampuan yang diharapkan berkembang dari pelatihan tersebut, karena pelatihan ini bertumpu pada perubahan kemampuan yang mana merupakan bagian dari perilaku, maka tujuan dirumuskan dalam bentuk perilaku (behavior objectives). Misalnya setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat melakukan pencatatan dan pelaporan secara benar.

Pelatihan ini dimaksudkan agar perangkat BPKAD Kabupaten Kampar bisa mengurangi adanya kemungkinan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena telah terlatih melalui adanya pelatihan. Pada dasarnya pelatihan muncul karena adanya masalah- masalah yang mengganggu kinerja organisasi seperti penurunan prestasi.

4.5.2 Penempatan Jabatan yang Sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan yang Dimiliki

Perbaikan kedua yang dapat dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah dengan penempatan jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Menurut Bapak Mukhrizal (2022) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengatakan bahwa perlu adanya penempatan jabatan sesuai dengan dasar pendidikan, seperti untuk pejabat penatausahaan keuangan atau PPK-SKPD adalah orang-orang yang berlatar belakang akuntansi.

Latar belakang pendidikan staf keuangan berhubungan erat dengan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan basis akrual. Dengan memperhatikan penempatan para staff dengan latar belakang pendidikan akuntansi maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan basis akrual, hal ini sejalan dengan penempatan pegawai di beberapa daerah, Kota/Kabupaten di Indonesia yang tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan sehingga masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP yang berlaku, hal ini terutama disebabkan karena pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan strata pendidikan yang masih rendah.

4.5.3 Menambah Tenaga Ahli Akuntansi

Perbaikan ketiga yang dapat dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah dengan menambah tenaga ahli terkhususnya dalam bidang akuntansi.

Belajar dari tren perubahan tenaga kerja antar waktu dari berbagai industri dan berbagai penyebab terjadinya perubahan kebutuhan tenaga kerja, perubahan kebutuhan tenaga ahli akuntansi profesional di bidang akuntansi keuangan khususnya di sektor keuangan daerah. Sungguh, pekerjaan yang sifatnya repetisi, mekanistik, mudah diprediksi, dan tidak kompleks disinyalir akan tergantikan oleh peran mesin, komputer, dan robot. Sebagian pekerjaan akuntan yang lekat dengan karakteristik tersebut telah tergantikan oleh mesin dan komputer.

Untuk menghindari hal tersebut, sudah saat nya BPKAD Kabupaten Kampar melakukan perekrutan tenaga akuntansi pada tahun dari tingkat pendidikan D3 akuntansi dan S1 akuntansi. Solusi lainnya, BPKAD Kabupaten Kampar harusnya menyediakan satu orang atau lebih tenaga ahli akuntansi yang mampu memverifikasi laporan keuangan SKPD sampai menjadi laporan keuangan pemerintah Daerah (Andi, 2022). Selain perekrutan pegawai, diperlukan juga adanya mapping tenaga akuntansi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kampar ke Seluruh Unit kerja yang ada di Kabupaten Kampar.

4.6 Kesimpulan Bab

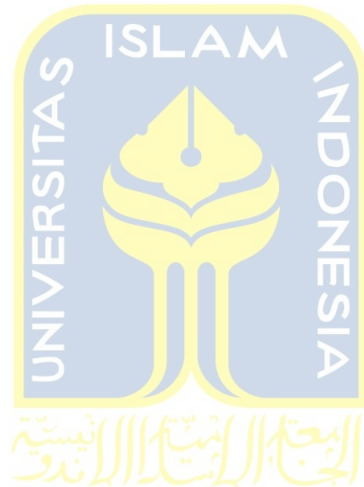
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan di Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kampar dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa sebelum menerapkan mekanisme akuntansi berbasis akrual, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar menggunakan metode Basis Kas dimana transparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup Pemerintah Daerah.

Dengan Implementasi akuntansi berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Kampar, cita-cita dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar sudah berhasil mencapai tujuannya dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kampar oleh BPK Provinsi Riau yang Wajar Tanpa Pengecualian dalam 7 tahun berturut turut mulai dari pertama SAP berbasis Akrual ini diterapkan di Kabupaten Kampar pada tahun 2015- 2021. Hal tersebut tak lepas dari kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang lebih disiplin dan dipermudah dengan adanya aplikasi yang mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan

Kekurangan dalam dalam menjalankan Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di Kabupaten Kampar adalah Kurangnya tenaga ahli akuntansi serta Sistem Pendukung yang belum bisa mengakomodir

kebutuhan sedangkan Kendala yang dihadapi dalam SAP Berbasis akrual ini adalah Minimnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi, Mutasi SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan Aplikasi yang masih belum berfungsi optimal.

Perbaikan yang dilakukan dalam menjalankan Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di Kabupaten Kampar adalah Pelatihan secara berkala kepada SDM di BPKAD Kabupaten Kampar, Penempatan Jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, dan Menambah Tenaga Ahli Akuntansi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan peneliti dapatkan berpedoman pada analisa yang telah dilakukan setelah wawancara dengan para narasumber untuk menjawab rumusan-rumusan masalah. Pada bab ini turut disampaikan terkait keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran yang peneliti berikan untuk penelitian yang akan datang.

5.2 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan Hasil dan analisa penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum di terapkan nya Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan metode kas basis, dimana laporan yang dihasilkan berdasarkan uang yang sudah dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima sebagai pendapatan (TBP/STS) dan diakui sebagai realisasi. Mulai dari tahun 2015 Mekanisme SAP Berbasis Akrual di Kabupaten Kampar dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*) menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual.

2. Dalam pengimplementasian-nya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya SDM terkait Akuntansi dan minimnya sistem pendukung. Kekurangan dan kendala yang muncul dalam proses penerapan SAP berbasis akrual oleh BPKAD Kabupaten Kampar diantaranya adalah kurangnya tenaga ahli akuntansi yang disebabkan oleh minimnya SDM berlatar belakang jurusan akuntansi, sistem pendukung yang belum bisa mengakomodir kebutuhan yang disebabkan oleh Aplikasi SIPKD yang masih belum berfungsi dan juga mutasi SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki
3. Terkait kendala yang ada, Perbaikan yang dilakukan dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di Kabupaten Kampar adalah Pelatihan secara berkala kepada SDM di BPKAD Kabupaten Kampar, Penempatan Jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, dan Menambah Tenaga Ahli Akuntansi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti masih menemukan beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi lebih mendalam terkait implementasi akuntansi berbasis akrual dikarenakan sebagian SDM yang ada pada BPKAD tersebut belum dapat memberikan penjelasan lebih mendalam dan masih hanya terbatas pada pemahaman dasar dari SAP berbasis akrual.

2. Tidak adanya standar operasional yang mengatur tentang mekanisme akuntabilitas dan transparansi akuntansi berbasis akrual pada BPKAD Kampar

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk para pegawai BPKAD Kabupaten Kampar diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis, pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, dan pelaksanaan sistem pengendalian internal agar lebih serius terutama sebelum masuk masa-masa audit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Kampar, sekiranya diperlukan perekrutan formasi CPNS untuk tenaga ahli akuntansi di BPKAD Kabupaten Kampar dengan jurusan yang linear agar pemahaman semasa kuliah dapat dituangkan dalam dunia kerja.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian mengenai evaluasi dari implentasi akuntansi berbasis akrual pada BPKAD dari wilayah lain, serta dapat menambah SKPD-SKPD lainnya agar dapat memperoleh perbandingan satu sama lain terkait implementasi akuntansi berbasis akrual yang telah di jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Hancock, D. ., & Algozzine, B. (2006). *Doing Case Study Research: APracticalGuide for Beginning Researchers. Third Edition*.
- Hari Sabarno. (2010). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hermawan, S., & Amirullah. (2021). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif. Metode Penelitian Bisnis Bandung*. James, E.
- A. (2013). *Special Preview Copy !* (Issue January 2013)
- Ma'um. (2011). *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta:Mifaz Rasam.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Andi (ed.)).
- Mardiasmo.(2018). *Perpajakan*. Jakarta: Andi Press
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung:Alfabeta
- Tudor, A. T., & Mutiu, A. (2006). *Cash Versus accrual accounting in public sector*. Universitas Babes Bolyai.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik.2015.*Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Jurnal/Publikasi/Website:

- About Coding. (2017). *QSR Interntional*.
- About Maps. (2021). *QSR International*. <https://help-nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.112d3ea61/Content/vizualizations/maps.htm>
- Al Falih, Muhammad Sabiq Hilal. 2019. Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Hutan Lestari Sumbawa). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. Universitas Teknologi Sumbawa. Volume.2 No.1
- Adhitama, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir).*Jurnal Akuntansi*. Vol 43 no.1
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). P. Bazeley and K. Jackson, Qualitative Data Analysis with NVivo (2nd ed.). *Journal of Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494
- Chetty, Priya. 2017. About Result summarisation using Nvivo, framework matrices. Project Guru. diakses pada <https://www.projectguru.in/result-summarisation-using-nvivoframework-matrices/>
- Denzim, N. K., & Lincoln, Y. (2009). Critical discourse analysis. *The Routledge Handbook of English Language and Digital Humanities*, 220–241.
- Erawati, T., & Kurniawan, D. 2018. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek keperilakuan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.21 No.2
- Endar Pituriningsih. 2016. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan dan Implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. *Lembaga Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol.14 No.1
- Ferryono, B. (2017). Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 143–158. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.6797>
- Huberman, A. M., & Miles, M. (n.d.). *The Qualitative Researcher's Companion. Understanding and Validity ini Qualitative Research*. SAGE Publication Inc..

- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* Vol. 3 No.1
- Kawasati, R. (2016). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1),
- Kemenkeu. (2014). Gambaran umum akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. 2, 1–13.
- KSAP. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat.
- Laughlin, R. (2012). Debate: accrual accounting: information for accountability or decision usefulness.
- Leavy, P. (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. In Syria Studies Vol. 7, Issue 1.
- Marthen, R. (2017). HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. 19(December), 26–37.
- Matrices, A. F. (2017). QSR International.
- Morasa, Jenny. 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 15 No.2
- Najati, I. (2016). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 1–18. <https://www.mendeley.com/catalogue/magister-pasca-sarjana-universitas-mataram/>
- Risnarningsih. (2016). Implementasi Dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.49>
- Robbins, S. P. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- Sabiq Hilal Al Falih, M. (2019). Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Hutan Lestari Sumbawa). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.302>

- Satrio, M. D. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59– 69. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- Sugiarto, E. (1998). Qualitative Research Process Abstract : Introduction : Postmodern Openings, 7, 143–156. https://www.researchgate.net/publication/267798343_Qualitative_Research_Process/figures?lo=1
- Sugiarto, E. (2017). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. In Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan tesis (pp. 32–41). Suaka Media.
- Yafie, M. (2013). PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA. *News.Ge*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Zelmiyanti, Riri. 2015. Perkembangan Penerapan Prinsip Konservatisme dalam Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* Vol.8 No.10
- Website BPKAD Kabupaten Kampar Riau. 2022. diakses pada <https://bpkad.kamparkab.go.id/visi-dan-misi/>

Regulasi dan Peraturan Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi awal perbaikan keuangan negara di Indonesia
- UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Nilai Tukar
- Pasal 22 Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Keputusan Kepala Tata Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Transkrip Wawancara 1

Nama: Bapak Mukhrizal

Jabatan: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tanggal: 7 Mei 2022

P : Pewawancara

N : Narasumber

P: Jadi begini pak, akuntansi berbasis akrual ini sudah diterapkan dari 2015 ya pak?

N: Iya sejak di terapkannya permendagri no. 64 tahun 2013 ya kalau gak salah

P:Apakah ada peraturan daerah dari kabupaten Kampar untuk menunjang mengimplementasian akuntansi berbasis akrual ini pak?

N: Iya ada, Kabupaten Kampar mengeluarkan regulasi lagi sebagai pemantapan yaitu Namanya kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi

P : Tau isi regulasi nya dari mana ya pak?

N : Tau nya dari permendagri 64 dan PP 71 tahun 2010

P : Jadi bagaimana kesiapan para pegawai BPKAD Kabupaten Kampar dalam menerapkan Sistem akuntansi berbasis akrual?

N : Rencana nya kita menyiapkan kesiapan SDM dengan memberikan pelatihan tentang regulasi-regulasi tersebut untuk mengenalkan dan memudahkan kita dalam merapkan Sistem akuntansi berbasis akrual tersebut.

P : Berapa kali pelatihan ini harus dilakukan?

N : Biasanya tergantung dari kesanggupan daerah tergantung anggaran, dan Kabupaten Kampar waktu pertama kali penerapan adanya berbasis akrual ini kita melakukan pelatihan sebanyak dua kali dalam setahun, namun sejak pandemic covid 19 Kabupaten Kampar tidak lagi melakukan pelatihan tersebut. Mungkin kedepannya ada rencana lagi untuk menambah pelatihan lagi dikarenakan akuntansi berbasis akrual ini selalu berkembang dari tahun ke tahun dengan aturan aturan baru, sekarang muncul lagi peraturan permendagri terbaru tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu permendagri 77 tahun 2020, namun secara akrual masih berpegang pada pp 71 tahun 2010 dan permendagri 64

P : Apakah dengan diterapkan nya sistem akuntansi berbasis akrual ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah?

N : Bapak tidak bisa menjamin, tergantung dari keadaan suatu pemerintah daerah karena bisa dikatakan dengan adanya pelatihan ini mampu meningkatkan sumber daya manusia, namun kadang-kadang dengan adanya pelantikan, perubahan jabatan itu menjadi suatu kendala kita memperlambat proses peningkatan SDM karena seringnya berganti ganti pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah

P : Jadi background SDM di BPKAD Kampar ini apakah akuntansi semua atau bagaimana pak?

N: Ya fifty fifty , ada yang akuntansi ada juga yang diluar akuntansi

P: Jadi bedanya basis kas dan basis akrual itu bagaimana pak?

N: Perbedaan nya seperti ini, kalau berbasis kas situ diakui saat uang keluar, namun pada akrual diakui apabila contohnya seperti ini ketetapan tentang piutang pada basis kas LRA itu diakui pendapatan apabila uang nya masuk namun secara akrual diakui apabila adanya ketetapan jadi muncul hak disitu, jadi itu bedanya

P: Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi sebelum adanya akuntansi berbasis akrual?

N: Ya bedanya seperti yang sudah saya bilang tadi berbasis kas dan berbasis akrual, kalau pada basis kas kita mengakui suatu belanja apabila keluar kas tapi pada basis akrual berbeda pengakuan hak nya apabila ada ketetapan maka disitu hak nya, maka saat itu diakui sebagai belanja

P: Perbedaan apa yang dirasakan dari perubahan basis kas dan basis akrual ?

N: Perbedaan nya dari segi laporan keuangan, pada basis kas hanya ada 5 laporan namun kita tidak bisa menentukan berapa sebenarnya potensi potensi yang kita peroleh kedepannya nah itu pada berbasis kas, namun pada berbasis akrual kita mengetahui potensi kita berapa yang mungkin akan kita bayar berapa yang mungkin akan kita peroleh nah disitu kelebihan dari basis akrual

P: Jadi bagaimana tingkat keberhasilan dari BPKAD Kampar dalam pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual?

N: Alhamdulillah dari regulasi dan penerapan saat ini kita ada penilaian dari tim audit dan itu kita memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sejak diterapkan

nya sistem akuntansi berbasis akrual ini selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian

P: Berarti sejak 2015 selalu WTP ya pak?

N: Iya kita selalu WTP.. WTP..

P: Faktor apa yang menjadi penentu keberhasilan dari implementasi akuntansi berbasis akrual ini pak?

N: Faktor terpenting yang pertama itu pasti SDM yang mengerti dan memahami akuntansi, factor yang kedua yaitu regulasi dan aturan daerah yang jelas sehingga menjadi satu pedoman yang jelas untuk menyusun laporan keuangan.

P: Apakah ada kendala yang di hadapi dari pengimplementasian akuntansi berbasis akrual ini pak?

N: Kendala kita adalah kekurangan tenaga akuntansi dalam pemerintah daerah sehingga kita merepotkan dan memberatkan kepada beberapa orang yang mengerti akuntansi karena hanya beberapa orang mengerti penerapan akuntansi berbasis akrual jadi seolah-olah pekerjaan itu menumpuk hanya pada sebagian orang saja, jadi lebih banyak bersantai daripada bekerja, jadi itu kendala kita kekurangan Sumber Daya Manusia

P: Selain kendala kekurangan SDM apakah ada kendala lainnya pak?

N: Kendala kita mungkin aplikasi pendukung yang mestinya betul betul secara 100% bisa mengakomodir seluruh seluruh kebutuhan kita namun nyata nya aplikasi kita belum sempurna

P: Aplikasi nya pakai pihak ketiga atau bagaimana pak?

N: Aplikasinya pakai pihak ketiga dan aplikasi itu berasal dari kementrian dan pihak ketiga dan kita kembangkan

P: Berarti kalau dari kementrian berarti semua daerah sama ya pak?

N: Sama, namun belum semua daerah menerapkan karna masih dalam tahap uji coba Namanya SIPD sedangkan aplikasi yang kita gunakan sekarang adalah SIPKD, dan kalau SIPKD itu tidak semua daerah yang menjalankan nya ada juga aplikasi SIMDA dan bermacam-macam aplikasi cuman SIPD ini belum bisa diterapkan karna masih baru baru launching jadi belum semua daerah bisa menjalankan

P: Jadi perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dari kendala-kendala yang terjadi pak?

N: Caranya tentunya menambah dalam setiap SKP itu menambah tenaga akuntansi yang mengerti tentang akuntansi berbasis akrual sehingga tidak menyulitkan kita saat melakukan konsolidasi data laporan keuangan karna tanpa itu kan kita tidak dapat melakukan penjurnalan karena setiap transaksi itu ada jurnal nya, kalau SKPD tidak mengerti jurnal bagaimana kita bisa menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, artinya perlu adanya peningkatan SDM dan perlunya tenaga akuntansi di setiap SKPD yang ada, itu caranya.

P: Berarti SKPD SKPD yang ada itu belajar akuntansi berbasis akrual nya dari BPKAD pak?

N: Sebenarnya kita sebagai entitas pelaporan dan mereka sebagai entitas akuntansi nya dan dulu saat pelatihan itu dibebankan pada anggaran BPKAD kita sebagai Pembina nya, namun faktor pandemic tadi kita tidak ada melakukan peningkatan

kualitas melalui pelatihan pelatihan, namun sebelumnya pada pertama akrual kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan itu.

P: Berarti sejak 2015 baru dua kali pelatihan pak?

N: Ohh bukan, pertahun nya dua kali, namun sejak pandemic tidak ada pelatihan lagi

P: Berarti tidak adanya dari tahun...

N: Dari 2019 tidak ada lagi

P: Jadi untuk transparansi nya bagaimana pak?

N: Transparansi nya maksudnya ini adalah kejelasan dalam menyampaikan informasi dalam laporan keuangan itu maksud transparan, jadi bagaimana kita menyajikan suatu informasi itu secara jelas gitukan sehingga mengerti bagi orang yang membaca

P: Kalau untuk masyarakat umum bisa mengakses laporan keuangan pak?

N: Bisa itu ada di bagian kominfo, jadi laporan keuangan kita ini nanti kita serahkan kebagian kominfo dan untuk dipublikasikan melalui website kominfo itu bisa di baca oleh masyarakat sebagai bukti transparansi.

P: Mungkin segitu dulu saja pak, terimakasih banyak pak

N: Iya sama sama

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara 2

Nama: Bapak Andi

Jabatan: Tenaga Ahli Akuntansi

Tanggal: 10 Mei 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Jadi akuntansi berbasis akrual ini sudah dari tahun 2015 ya pak?

N: Iya sudah dari 2015

P: Jadi bagaimana kesiapan para pegawai pada BPKAD kab Kampar dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual?

N: Jadi pada tahap pertama tim akuntansi dari BPKAD kabupaten Kampar melakukan bimtek dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru terkait permendagri no 64 tahun 2013 tentang akuntansi yang berbasis akrual, itu yang pertama, bimbingan teknis.

P: Apakah dengan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan?

N: Tahap pertama pada implementasi ya memang ada kesulitan kemudian ketika berjalan satu tahun dua tahun percepatan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat

P: Berarti bisa disimpulkan bahwa dengan diterapkan nya akuntansi berbasis akrual ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pak?

N: Ya ya ya

P: Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi sebelum adanya sistem akuntansi berbasis akrual ini pak?

N: Proses pelaporan sebelumnya sebelum adanya akrual itu berbasis kas dimana proses pencatatan keuangan berdasarkan data yang sudah cair atau dana yang sudah masuk ke kas daerah, itu sebelum adanya akrual. Kalau sesudah akrual proses pencatatan laporan keuangan itu dicatat setelah keluar berita acara atau surat ketetapan pajak maka proses pencatatan di akuntansi sudah dimulai.

P: Apa perbedaan yang dirasakan dari perubahan akuntansi kas dan akrual pak?

N: akuntansi kas memang cukup simple, pertama pada basis kas pencatatan akuntansi setelah dana cair atau setelah uang diterima di kas daerah, kemudian setelah akrual proses itu dirubah dimana pencatatan data pada laporan keuangan terutama belanja modal itu lebih dahulu di catat sebelum dilakukan pencairan dana, begitu juga dengan penerimaan beberapa komponen penerimaan dicatat lebih awal dimana itu akan menjadi komponen piutang pada akuntansi atau neraca laporan keuangan

P: Jadi untuk tingkat keberhasilan BPKAD kab Kampar dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual itu seperti apa pak?

N: Semejak dilakukan nya atau di implementasikannya akuntansi berbasis akrual alhamdulillah kabupaten Kampar sudah mencapai target wajar tanpa pengecualian dimana kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih

disiplin, kemudian dipermudah dengan adanya aplikasi yang mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan

P: Aplikasi nya itu aplikasi apa pak?

N: Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

P: Aplikasi ini hanya ada di kabupaten Kampar atau bagaimana pak?

N: Kurang lebih ada 170 daerah di kabupaten/kota yang menggunakan aplikasi ini

P: Itu aplikasi nya pakai pihak ketiga atau bagaimana pak?

N: Iya pemilik nya adalah kementrian dalam negeri.

P: Faktor apa yang menjadi penentu keberhasilan dalam pengimplementasian akuntansi berbasis akrual di BPKAD kab Kampar ini pak?

N: Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang terus dilatih setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur bendahara, kemudian PPKSKP dan pengguna anggarannya dalam pemahaman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, kemudian yang kedua peningkatan infrastruktur dari perangkat server untuk mendukung aplikasi kemudian di dukung dengan kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya implementasi permendagri 64 tahun 2013.

P: Tadi kan bapak bilang peningkatan sumber daya manusia yang mengerti akuntansi, jadi seberapa banyak orang-orang yang berbasis akuntansi di BPKAD kab Kampar ini pak?

N: Untuk SDM rata-rata basic nya akuntansi itu sedikit mungkin bisa di hitung jari ya, sarjanan ekonomi pun sedikit, maka dari itu keterhambatan atau kendala

yang menjadi salah satu kendala dari pengimplementasian itu yak arena SDM nya juga banyak yang tidak berkeilmuan akuntansi ataupun sarjana ekonomi, nah itu menjadi kesulitan dalam proses pengimpelentasian, kemudian hanya sekitar 30% yang memahami akuntansi, begitu juga di BPKAD yang basic nya akuntansihanya satu orang kalo gak salah.

P: Kenapa bisa terjadi kurangnya tenaga ahli akuntansi dalam pemerintah daerah?

N: Dalam penerimaan CPNS untuk formasi belum optimal sesuai dengan yang dibutuhkan, yang idealnya setiap SKPD memiliki 1 orang tenaga ahli akuntansi khusus penyusunan pelaporan

P: Dari segi IT, kendala seperti apa saja yang terjadi?

N: sisi teknologi sudah didukung 60% membantu kinerja SDM dalam penyusunan Laporan Keuangan, yang masih sedikit terkendala dari kapasitas koneksi internet yang kurang optimal

P: Jadi perbaikan apa yang dilakukan untuk meminimalisir kendala yang ada?

N: Pertama yaitu dengan dilakukannya bimbingan teknis, pada awal-awal pengimpelementasian hampir setiap tahun diadakan terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan, kemudian penggunaan aplikasi, dan pemahaman akuntansi dasar.

P: Berarti sekarang sudah tidak dilakukan bimbingan teknis lagi pak?

N: Alhamdulillah udah jarang bimtek lagi

P: Berarti untuk kedepannya belum tentu ada bimtek lagi?

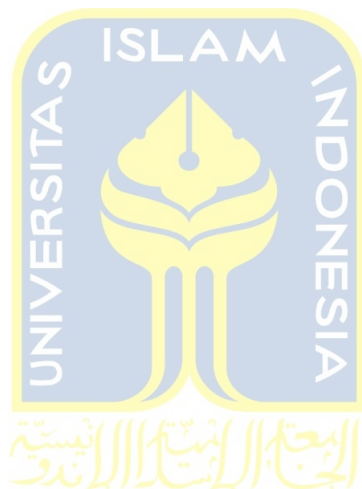
N: Ya kita hanya mengikuti perkembangan dari perundang-undangan.

P: Selain kendala SDM dan sistem apakah ada kendala lain pak?

N: Hmmm,, kendala yang paling banyak ya hanya pada SDM, karena tiap tahun SDM ada pergantian itu yang menjadi kendala karena harus ada proses pembelajaran lagi untuk mereka yang baru-baru.

P: Mungkin cukup segitu dulu saja pak. Terimakasih pak

N: iya sama sama.



LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara 3

Nama: Bapak Mukhrizal

Jabatan: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tanggal: 25 Mei 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Jadi melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin pak, masih ada beberapa yang masih belum saya pahami, yang pertama terkait aplikasi baru SIPD yang bapak sampaikan kemarin, bapak mengatakan bahwa aplikasi tersebut masih dalam tahap penyempurnaan, tahap penyempurnaan seperti apa yang dimaksud pak?

N: Aplikasi baru dari permendagri ini seluruh daerah baru pada menu penanggaran dilaksanakan, sedangkan dipertanggungjawabkan atau laporan keuangan masih banyak kendala, karena penatausahaan belum berjalan, di dalam aplikasi tersebut ada 4 output, yang pertama penganggaran, kedua penatausahaan, ketiga pertanggungjawaban, dan keempat adalah asset. Jika nomor dua (penatausahaan) belum berjalan maka nomor tiga (pertanggungjawaban) dan nomor empat (asset) tidak dapat dilaksanakan.

P: Berarti secara garis besar ini terkendala pada apa ya pak?

N: Ya balik lagi terkendala karena SDM nya lemah dalam pemahaman akuntansi, lalu aplikasi yang diberikan belum memadai, dan regulasi yang sering berubah-ubah

P: Ohh begitu pak, nahh kemarin bapak juga mengatakan bahwa laporan keuangan pada basis kas ada 5 jenis laporan, kalau boleh tau itu terdiri dari apa saja ya pak?

N: Ooh laporan yang 5 itu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

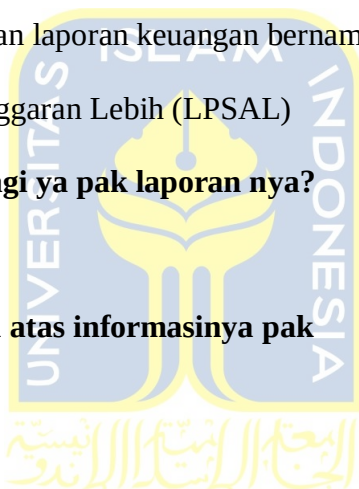
P: Sedangkan pada basis akrual terdapat 7 jenis laporan pak, laporan apa saja yang menjadi tambahan nya?

N: Sama seperti pada basis kas yang mana ada LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK. Pada basis akrual ada tambahan laporan keuangan bernama Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

P: Oo jadi lebih kompleks lagi ya pak laporan nya?

N: Nah iya betul dek

P: Kalau begitu terimakasih atas informasinya pak



LAMPIRAN 4
Transkrip Wawancara 4

Nama: Bapak Andi Suandi

Jabatan: Tenaga Ahli Akuntansi

Tanggal: 25 Mei 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Terkait yang disampaikan oleh Bapak Mukhrizal kepada saya pak tentang aplikasi SIPKD yang belum 100% berfungsi itu, bagaimana menurut bapak sebagai tenaga ahli akuntansi?

N: Ooh iya pada aplikasi SIPKD ini belum berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemda dari Aplikasi tersebut, hanya sebatas Laporan Keuangan SKPD, karena terbatasnya SDM yang melakukan verifikasi terhadap semua jenis laporan, sehingga fitur yang ada di aplikasi SIPKD tersebut belum disempurnakan untuk menyesuaikan kebutuhan Laporan Pemda

P: Jadi bagaimana solusi untuk mengatasi kendala ini pak?

N: Solusinya ya menunjuk atau menyediakan satu orang atau lebih tenaga ahli akuntansi yang mampu memverifikasi laporan keuangan SKPD sampai jadi laporan keuangan pemda

P: Ooh begitu terimakasih pak informasinya

LAMPIRAN 5
Transkrip Wawancara 5

Nama: Bapak Mukhrizal

Jabatan: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tanggal: 10 Mei 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin pak, masih ada yang ingin saya tanyakan, terkait kendala yang terjadi pada implementasi akuntansi berbasis akrual ini pak

N: Iya bagaimana?

P: Selain kendala dari kurangnya Sumber Daya Manusia apalagi kendala yang terjadi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual ini pak? apakah dari perangkat server yang tidak mendukung termasuk kendala pak?

N: Iya itu juga berpengaruh, karena aplikasi lama (SIPKD) yang sudah digunakan belum 100% berfungsi, namun di datangkan lagi aplikasi baru dari kemendagri yang bernama SIPD tetapi aplikasi tersebut masih dalam proses penyempurnaan.

P: Jadi aplikasi ini termasuk kendala yang berpengaruh ya pak?

N: Iyaa tentu karna dalam proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan aplikasi pendukung yang dapat mengakomodir segala kebutuhan yang diperlukan.

P: Terkait masalah aplikasi tersebut pak, bagaimana cara SDM tersebut bisa menyesuaikan terhadap aplikasi tersebut?

N: Untuk masalah aplikasi ini kita memberikan pendampingan kepada para pegawai-pegawai kita berupa pembinaan dan pelatihan kepada mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut.

P: Yang memberikan pelatihan itu siapa ya pak?

N: Ya kita dari BPKAD nya langsung yang memberikan pelatihan

P: Oh hiya pak, terkait Sumber Daya Manusia tadi, selain minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang akuntansi kendala seperti apalagi yang terjadi ya pak? Apakah dari segi mutasi juga menjadi kendala?

N: Iyaa dari segi mutasi juga menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan ini

P: Kalau untuk mengatasi mutasi pegawai tersebut pak bagaimana ya caranya?

N: Ya menurut saya perlu adanya penempatan jabatan sesuai dengan dasar pendidikan, seperti untuk pejabat penatausahaan keuangan atau PPK-SKPD adalah orang-orang yang berlatarbelakang akuntansi

P: Kalau untuk mengatasi minimnya SDM yang berlatarbelakang akuntansi tersebut bagaimana ya pak? Apa yang bisa dilakukan?

N: Sekiranya perlu dilakukan pelatihan dan perekrutan formasi CPNS untuk tenaga ahli akuntansi

P: Kalau dari regulasi apakah masih terdapat kendala pak?

N: Sedikit bermasalah pada bagan akun standarnya, pada sistem akuntansi pemda
Kampar masih yang lama, sedangkan yang baru adalah permendagri 90 tentang
bagan akun standar

P: Jadi yang menjadi kendala besar nya memang dari SDM ya pak?

N: Iya betul sekali

P: Mungkin segitu dulu untuk hari ini pak, terimakasih

N: Ohh iyaa sama sama



LAMPIRAN 6
Transkrip Wawancara 6

Nama: Bapak Andi Suandi

Jabatan: Tenaga Ahli Akuntansi

Tanggal: 3 Juni 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Bagaimana mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebelum adanya akuntansi berbasis akrual?

N : Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan metode kas basis, dimana laporan yang dihasilkan berdasarkan uang yang sudah dicairkan berdasarkan uang yang sudah dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima sebagai pendapatan (TBP/STS) dan diakui sebagai realisasi.

P : Bagaimana mekanisme transparansi pengelolaan keuangan daerah sebelum adanya akuntansi berbasis akrual?

N : Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.

P: Bagaimana mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah setelah adanya akuntansi berbasis akrual?

N : Pengelolaan keuangan daerah bertransformasi dari basis kas ke basis akrual. Dimana ada beberapa perubahan dalam mekanisme pertanggungjawaban, yaitu ada beberapa penerimaan kas sudah dicatat sebagai piutang jika ada surat ketetapan pajak/retribusi, kemudian timbul piutang jika sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan keduanya masuk pada komponen Neraca. Jika sebelumnya dicatat setelah dana cair.

P : Bagaimana mekanisme transparansi pengelolaan keuangan daerah setelah adanya akuntansi berbasis akrual?

N : Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD, pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat. Dan pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan.

P: Bagaimana caranya SKPD memantau proses pencairan mereka pak?

N: dengan aplikasi yang bernama SIPKD, disana mereka bisa memantau proses pencairan dana

LAMPIRAN 7

Transkrip Wawancara 7

Nama: Bapak Mas'ud

Jabatan: Kepala Sub Bidang Pelaporan

Tanggal: 13 Juni 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Begini pak tujuan saya bertemu bapak ingi bertanya terkait perubahan yang bapak rasakan dari sistem akuntansi yang ada

N: Oiya gimana dek pertanyaannya?

P: Perbedaan apa yang bapak rasakan dari akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual ini pak?

N: Yang pertama dari jangka waktu, pada akuntansi berbasis kas pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika dana telah di debit atau dikreditkan. Sedangkan pada akuntansi berbasis akrual pendapatan dan pengeluaran dicatat segera setelah layanan atau produk digital. Yang kedua adalah ketepatan, pada akuntansi berbasis kas kurang efektif digunakan dalam jangka panjang, sedangkan pada akuntansi berbasis akrual memiliki representasi yang lebih akurat dan memberikan gambaran nyata. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan pada akuntansi berbasis kas lebih mudah dalam pencatatan dan pengecekan. Hal ini dikarenakan hanya membutuhkan lebih sedikit entri jurnal. Sedangkan pada akuntansi berbasis akrual yang membutuhkan lebih banyak entri jurnal untuk setiap transaksi yang terjadi. Yang ke empat adalah arus kas, pada akuntansi berbasis kas memberikan keakuratan pada setiap kas yang masuk dan keluar dari

sistem. Sedangkan untuk akuntansi berbasis akrual lebih sulit merepresentasikan laporan kas yang benar. Yang terakhir yaitu analisis tren. Dikarenakan akuntansi berbasis kas hanya mencatat transaksi ketika dana berpindah tangan, mungkin ada kesenjangan atau celah waktu yang signifikan antara kejadian actual dengan pencatatannya. Oleh karena itu analisis tren tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk akuntansi akrual dikarenakan setiap transaksi dicatat ketika terjadi, ada representasi yang lebih akurat pada setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian lebih mudah untuk menganalisis pola penjualan atau pengeluaran.

P: Wah berarti ada plus minus nya juga ya pak dari kedua basis akuntansi ini?

N: Iya benar..

P: Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebelum diterapkan nya akuntansi berbasis akrual pak?

N: Pencatatan dilakukan yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas, sedangkan untuk transparansi pengelolaan keuangan lebih terbuka di akrual

P: Jadi transparansi pada akuntansi berbasis kas ini seperti apa ya pak?

N: Untuk laporan keuangan tersebut hanya bisa di akses oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan

P: Kalau untuk setelah diterapkan nya akuntansi berbasis akrual bagaimana pak?

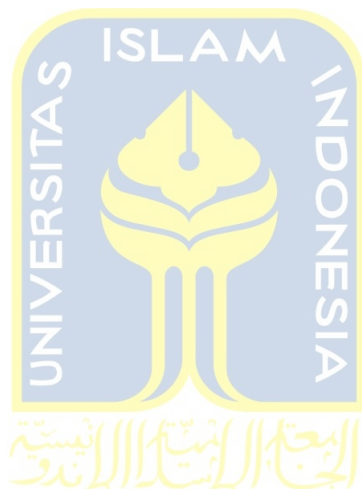
N: Pada basis akrual ini transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut

tanpa memperhatikan waktu kas atau sarana kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk transparansi nya lebih transparan dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

P: Kalau terkait kendala yang dihadapi apakah ada pak?

N: Penggunaan akuntansi berbasis akrual ini menjadikan entitas tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan pihak lain bisa diterima. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini bisa berakibat pada penurunan ekuitas yang diakibat dari penyusutan dan amortisasi.

P: Ooh begitu pak, baik pak terimakasih atas jawabannya pak..



LAMPIRAN 8

Transkrip Wawancara 8

Nama: Ibu Yurnida

Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset

Tanggal: 16 Juni 2022

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Begini buk saya ingin bertanya kepada ibuk tentang perbedaan yang dirasakan dari akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual bu

N: Perbededaan yang dirasakan antara lain Jangka waktu, dimana Akuntansi berbasis kas pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika dana telah didebit atau dikreditkan.sedangkan Akuntansi berbasis akrual pendapatan dan pengeluaran dicatat segera setelah layanan atau produk digunakan.

P: Lalu terkait mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebelum adanya akuntansi berbasis akrual bagaimana bu

N: Pencatatan dilakukan yang hanya mencatat Transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran Kas. Untuk transparansi pengelolaan keuangan lebih terbuka di Akrual.

P: Kalau pada basis akrual sendiri bagaimana buk mekanisme akuntabilitas dan transparansi nya

N: Transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui , dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu Kas atau sarana Kas diterima atau dibayar. Lebih Transparan dibandingkan dengan Mekanisme sebelumnya

P: Kalau untuk kendala yang dihadapi seperti apa bu?

N: Kalau dari kendala menurut saya sama seperti yang sudah dijelaskan pak mas'ud tadi yaitu Penggunaan akuntansi berbasis akrual menjadikan entitas tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan pihak lain bisa diterima. Penerapan akuntansi berbasis akrual bisa berakibat pada penurunan ekuitas. Yang diakibatkan dari penyusutan dan amortisasi.

P: Begitu ya bu, makasih ya bu jawabannya..



LAMPIRAN 9

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/202

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Universitas Islam Indonesia Nomor : 930/DEK/Dir.UR/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **INDAH ARIATY PUTRI**
2. NIM : **18312263**
3. Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
4. Program Studi : **AKUNTANSI**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **YOGYAKARTA**
7. Judul Penelitian : **PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BPKAD KABUPATEN KAMPAR RIAU DENGAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**
8. Lokasi : **BPKAD KABUPATEN KAMPAR RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 11 April 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idipol, wawasan kebangsaan
 dan Karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor BPKAD Kab. Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dekan Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 10

Peraturan Bupati Kampar No. 62 Tahun 2016



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

LAMPIRAN 11

Peraturan Bupati Kampar No. 20 Tahun 2014



BUPATI KAMPAR
PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akutansi Pemerintah Darah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada standar akutansi pemerintah;
 - b. Bahwa dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan, Peraturan Bupati Kampar No Tahun 20 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan dinamika pemerintahan, khususnya berkaitan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan dan penyesuaian.

LAMPIRAN 12

Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum berbasis Akrua			
	A : A. sebelum implementasi akuntansi berbasis akrual	B : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Metode Basis Kas dan Basis Cash Toward Accrual	C : 2. Laporan Keuangan berbentuk fisik
1 : wawancara ibu yurnida 16juni		Akuntansi berbasis kas pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika dana telah didebit atau dikreditkan	
2 : wawancara pak andi 10Mei			
3 : Wawancara Pak andi 25Mei			
4 : wawancara pak andi 3 juni 2022		Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan metode kas basis, dimana laporan yang dihasilkan berdasarkan uang yang sudah dicairkan berdasarkan uang yang sudah dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima sebagai pendapatan (TBP/STS) dan diakui sebagai realisasi	Transaparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.

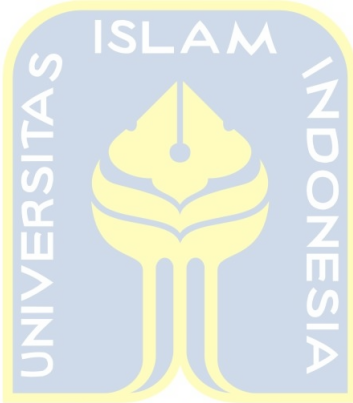
Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum berbasis Akrual

	A : A. sebelum implementasi akuntansi berbasis akrual	B : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Metode Basis Kas dan Basis Cash Toward Accrual	D : 3. Terdapat 5 jenis Laporan Keuangan
5 : wawancara pak mas'ud 13juni		<p>pencatatan dilakukan yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas</p> <p>pada basis akrual ini transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktukas atau sarana kas diterima atau dibayar</p>	
7 : wawancara pak mukhrizal 7Mei		kalau pada basis kas kita mengakui suatu belanja apabila keluar kas	perbedaan nya dari segi laporan keuangan, pada basis kas hanya ada 5 laporan namun kitatidak bisa menentukan berapa sebenarnya potensi potensi yang kita peroleh kedepannya nah itu pada berbasis kas, namun pada berbasis akrual kita mengetahui potensi kita berapa yang mungkin akan kita bayar berapa yang mungkin akan kita peroleh nah disitu kelebihan dari basis akrual
8 : Wawancara Pak mukrizal 25Mei			ooh laporan yang 5 itu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum berbasis Akrual			
	J : 4. Masyarakat belum bisa mengakses laporan keuangan daerah	K : 5. Aturan Pengelolaan Keuangan yang kurang mendukung	L : 6. Teknologi yang belum mendukung
4 : wawancara pak andi 3 juni 2022	Transaparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.	Transaparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.	Transaparansi pengelolaan keuangan daerah pada saat itu belum begitu terbuka, karena berbagai laporan masih dalam bentuk fisik (buku) yang terbatas pada lingkup PEMDA, karena beberapa hal yang belum mendukung seperti teknologi, SDM yang belum siap dan belum didorong dengan aturan pendukungnya.
5 : wawancara pak mas'ud 13juni	untuk laporan keuangan tersebut hanya bisa di akses oleh orang- orang tertentu yang memiliki kepentingan		

LAMPIRAN 13

Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengeelolaan Keuangan Daerah Sesudah Berbasis Akrua			
	A : B. sesudah implementasi akuntansi berbasis akrual	B : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Metode Basis Akrua	C : 2. Laporan Keuangan yang di olah oleh Sistem Pendukung
1 : wawancara ibu yurnida 16juni		Akuntansi berbasis akrual pendapatan dan pengeluaran dicatat segera setelah layanan atau produk digunakan.	
2 : wawancara pak andi 10Mei			
3 : Wawancara Pak andi 25Mei			
4 : wawancara pak andi 3 juni 2022		Pengelolaan keuangan daerah bertransformasi dari basis kas ke basis akrual. Dimana ada beberapa perubahan dalam mekanisme pertanggungjawaban, yaitu ada beberapa penerimaan kas sudah dicatat sebagai piutang jika ada surat ketetapan pajak/retribusi, kemudian timbul piutang jika sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan keduanya masuk pada komponen Neraca. Jika sebelumnya dicatat setelah dana cair.	Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD, pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat. Dan pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan.
Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengeelolaan Keuangan Daerah Sesudah Berbasis Akrua			

	L : 4. Laporan Keuangan Bisa di akses Melalui WEB Daerah	M : 5. Perubahan Regulasi yang mendukung	N : 6. Teknologi yang sudah berkembang	O : 7. Basis AkruaI mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
2 : wawancara pak andi 10 Mei				semejak dilakukan nya atau di implementasikannya akuntansi berbasis akrual alhamdulillah kabupaten Kampar sudah mencapai target wajar tanpa pengecualian dimana kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih disiplin, kemudian dipermudah dengan adanya aplikasi yang mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan
4 : wawancara pak andi 3 juni 2022	Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD, pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses	Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD, pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak	Dengan adanya perkembangan teknologi dan didorong dengan perubahan regulasi, maka transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka, dimana dari proses perencanaan masyarakat sudah bisa akses data yang akan masuk dalam APBD,	

	pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat. Dan pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan.	ketiga/masyarakat. Dan pertanggungjawaban tersedia di portal pemerintahan.	pelaksanaan APBD bisa dilihat di akses WEB, proses pencairan dana bisa dipantau oleh SKPD masing-masing dan pihak ketiga/masyarakat.	
--	---	--	--	--

Framework Matrices Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pengeelolaan Keuangan Daerah Sesudah Berbasis Akrua		
	D : 3. Terdapat 7 jenis Laporan Keuangan	O : 7. Basis Akrua mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
7 : wawancara pak mukhrizal 7mei		alhamdulillah dari regulasi dan penerapan saat ini kita ada penilaian dari tim audit dan itu kita memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sejak diterapkan nya sistem akuntansi berbasis akrua ini selau memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
8 : Wawancara Pak mukhrizal 25Mei	Sama seperti pada basis kas yang mana ada LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK. Pada basis akrua ada tambahan laporan keuangan bernama Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL)	

LAMPIRAN 14

Kekurangan dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

	A : II. Kekurangan dan Kendala dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual	B : A. Kekurangan dalam menjalankan SAP berbasis akrual	C : 1. Kurangnya tenaga ahli akuntansi dalam pemerintah daerah	D : 2. Sistem Pendukung yang belum bisa mengakomodir kebutuhan
2 : wawancara pak andi 10Mei			hmmm,, kendala yang paling banyak ya hanya pada SDM, karena tiap tahun SDM ada pergantian itu yang menjadi kendala karena harus ada proses pembelajaran lagi untuk mereka yang baru-baru.	
7 : wawancara pak mukhrizal 7Mei			kendala kita adalah kekurangan tenaga akuntansi dalam pemerintah daerah sehingga kita merepotkan dan memberatkan kepada beberapa orang yang mengerti akuntansi karena hanya beberapa orang mengerti penerapan akuntansi berbasis akrual jadi seolah-olah pekerjaan itu menumpuk hanya pada sebagian orang saja, jadi lebih banyak bersantai daripada bekerja, jadi itu kendala kita kekurangan Sumber Daya Manusia	kendala kita mungkin aplikasi pendukung yang mestinya betul betul secara 100% bisa mengakomodir seluruh kebutuhan kita namun nyata nya aplikasi kita belum sempurna

Kendala dalam Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua				
	E : B. Kendala dalam menjalankan SAP berbasis akrual	F : 1. Minimnya SDM yang berlatar belakang Pendidikan Akuntansi	G : 2. Mutasi SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki	H : 3. Aplikasi yang masih belum berfungsi sempurna
2 : wawancara pak andi 10Mei		untuk SDM rata-rata basic nya akuntansi itu sedikit mungkin bisa di hitung jari ya, sarjana ekonomi pun sedikit, maka dari itu keterhambatan atau kendala yang menjadi salah satu kendala dari pengimplementasian itu yak arena SDM nya juga banyak yang tidak berkeilmuan akuntansi ataupun sarjana ekonomi, nah itu menjadi kesulitan dalam proses pengimpelentasian, kemudian hanya sekitar 30% yang memahami akuntansi, begitu juga di BPKAD yang basic nya akuntansi hanya satu orang kalo gak salah.	untuk SDM rata-rata basic nya akuntansi itu sedikit mungkin bisa di hitung jari ya, sarjana ekonomi pun sedikit, maka dari itu keterhambatan atau kendala yang menjadi salah satu kendala dari pengimplementasian itu yak arena SDM nya juga banyak yang tidak berkeilmuan akuntansi ataupun sarjana ekonomi, nah itu menjadi kesulitan dalam proses pengimpelentasian, kemudian hanya sekitar 30% yang memahami akuntansi, begitu juga di BPKAD yang basic nya akuntansi hanya satu orang kalo gak salah.	
3 : Wawancara Pak andi 25Mei				ooh iya pada aplikasi SIPKD ini belum berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemda dari Aplikasi tersebut, hanya sebatas Laporan Keuangan SKPD, karena terbatasnya SDM yang melakukan verifikasi terhadap semua jenis laporan, sehingga fitur yang ada di aplikasi SIPKD tersebut belum

				disempurnakan untuk menyesuaikan kebutuhan Laporan Pemda
6 : wawancara pak mukhrizal 10Mei			iyaa dari segi mutasi juga menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan ini	iya itu juga berpengaruh, karena aplikasi lama (SIPKD) yang sudah digunakan belum 100% berfungsi, namun di datangkan lagi aplikasi baru dari kemendagri yang bernama SIPD tetapi aplikasi tersebut masih dalam proses penyempurnaan.
7 : wawancara pak mukhrizal 7Mei		kendala kita adalah kekurangan tenaga akuntansi dalam pemerintah daerah sehingga kita merepotkan dan memberatkan kepada beberapa orang yang mengerti akuntansi karena hanya beberapa orang mengerti penerapan akuntansi berbasis akrual jadi seolah-olah pekerjaan itu menumpuk hanya pada sebagian orang saja, jadi lebih banyak bersantai daripada bekerja, jadi itu kendala kita kekurangan Sumber Daya Manusia		

LAMPIRAN 15

Usulan Perbaikan Terhadap Kendala dalam Menjalankan SAP Berbasis Akrua

	A : III. Usulan perbaikan terhadap kendala dalam menjalankan SAP berbasis akrual	B : A. Pelatihan secara berkala kepada para SDM	C : B. Penempatan Jabatan yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan yang dimiliki	D : C. Menambah Tenaga Ahli Akuntansi
2 : wawancara pak andi 10Mei		pertama yaitu dengan dilakukannya bimbingan teknis, pada awal-awal pengimpelementasian hampir setiap tahun diadakan terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan, kemudian penggunaan aplikasi, dan pemahaman akuntansi dasar.		
3 : Wawancara Pak andi 25Mei				solusinya ya menunjuk atau menyediakan satu orang atau lebih tenaga ahli akuntansi yang mampu memverifikasi laporan keuangan SKPD sampai jadi laporan keuangan pemda
6 : wawancara pak mukhrizal 10Mei		untuk masalah aplikasi ini kita memberikan pendampingan kepada para pegawai-pegawai kita berupa pembinaan dan pelatihan kepada mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut.	ya menurut saya perlu adanya penempatan jabbatan sesuai dengan dasar pendidikan, seperti untuk pejabat penatausahaan keuangan atau PPK-SKPD adalah orang-orang yang berlatarbelakang akuntansi	